

GEMA KEADILAN

ISSN: 0852-0011 No. 2 Tahun ke 47: 2022



MENJAGA PERDAMAIAN, AKANKAH RUSIA MUNDUR DARI UKRAINA?

Catatan Dunia Baru Torehan
Konflik Rusia - Ukraina

LAPORAN UTAMA

Ukraina vs Rusia, Daud Lawan
Jalut Masa Ini?

LIPUTAN TEKNOLOGI



SALAM REDAKSI

Awal tahun 2022 ditandai dengan terjadinya eskalasi konflik yang terjadi di Eropa Timur, antara dua negara: Ukraina serta Rusia. Pada 24 Februari 2022, pihak Rusia memasuki wilayah Ukraina, setelah lama “menunggu” dan memusatkan kekuatan di perbatasan Ukraina-Rusia, juga di Ukraina - Belarusia. Pertempuran langsung pun dilancarkan oleh Rusia, dilakukan melalui jalur darat, udara, maupun air. Masyarakat dunia yang belum sepenuhnya sembuh dari pandemi COVID-19, langsung digemparkan kembali oleh konflik antarnegara terbesar sejak Perang Dunia II.

Perang di antara keduanya sebenarnya sudah dimulai semenjak tahun 2014. Terjadinya peristiwa Euromaidan—di mana Ukraina menyatakan dirinya ingin lepas dari pengaruh Kremlin dan mulai mendekati ke Barat—mendorong Rusia untuk menganeksasi Krimea serta menyerang bagian perbatasan timur Ukraina dengan Rusia. Peristiwa invasi Rusia ini pun (dikabarkan) didorong oleh Ukraina yang menyatakan akan bergabung dengan organisasi pertahanan terbesar dunia, yaitu North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Tentunya, perang di wilayah manapun, oleh pihak siapapun, menimbulkan reaksi di segala penjuru dunia, apalagi dengan skala sebesar ini. Rusia dihitung sebagai salah satu pusat ekonomi dunia terpenting, dengan stok bahan bakar fosil nomor satu di dunia. Ukraina pun tak kalah: ia punya bekingan dunia Barat, termasuk di dalamnya Amerika Serikat—negara terkaya sepanjang sejarah manusia. Ia membawa dampak besar, baik dari segi politis, yuridis, maupun juga ekonomis.

Efek perang pun sampai juga ke dalam negeri. Indonesia sebagai pemegang Presidensi sekaligus tuan rumah G20 Tahun 2022, merasa memiliki posisi strategis sebagai “penengah” konflik dan hendak mengedepankan perdamaian antara kedua negara. Apalagi, baik Rusia maupun Ukraina adalah rekan ekonomi Indonesia: Rusia dengan minyak buminya, Ukraina dengan gandumnya.

Dari situlah kami mengangkat Majalah tahun ini dengan Tema “Geopolitik Ukraina-Rusia”. Kami hendak menyampaikan kepada khalayak, khususnya warga Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, informasi-informasi seputar perang ini, sebagai bentuk berita, analisis ilmiah, maupun catatan sejarah, yang pastinya akan kita ingat sampai generasi-generasi mendatang.

Kami berharap tulisan kami bermanfaat; menambah wawasan untuk semua. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada pembaca, karena tanpa Anda, kami tak akan bekerja. Kritik serta saran dari pembaca juga kami tunggu, agar bisa menjadi pegangan dalam menyusun Majalah Gema Keadilan periode berikutnya.

Dari redaksi, kami ucapkan: Salam Perdamaian.

Redaktur Pelaksana Majalah

Naura Vidya, Witra Surawinata

STRUKTUR ORGANISASI

Pembina Mochammad Azhar, S.H., LL.M.

Dewan Redaksi Taufikh Hidayat, Alya Sani, Syafira Qatrunnada, Ayu Putri, Febriani Dwi, Nabilah Deizi, Leonard Marcel, Febri Manista

Pemimpin Umum Muhammad Ridho

Sekretaris Umum Firnanda Anggie

Bendahara Umum Vanessa Kristina

Pemimpin Redaksi Adri Siregar

Sekretaris Redaksi Rindu

Redaktur Pelaksana Artistik Aqila

Staf Artistik Carissa, Fadhila, Faustina, Jihara

Redaktur Pelaksana GKTV Rayhan

Staf GKTV Faizal, Raysa

Redaktur Pelaksana Infografis Galuh

Staf Infografis Oriyah, Shella

Redaktur Pelaksana Jurnal Widya

Redaktur Pelaksana Majalah Naura, Witra

Redaktur Pelaksana Media Online Nilam, Vanya

Staf Media Online Agis, Caca, Atmakeno, Syifa, Putri

Redaktur Pelaksana Tabloid G'Corner Nazwa, Maulisna

Redaktur Pelaksana Replik Ita

Pemimpin PSDM Adriel Benedict

Staf PSDM Adrian, Alifannisa, Bunga, Chaterine, Fikri, Kevin, Neyssa, Rasyid, Welly, Ester, Savita, Nadia, Poltak, Robby, Putri, Salma, Devi, Yogi, Dhea, Defranna

Pemimpin Perusahaan Faradisya Diandra Putri

Manager Rumah Tangga Keuangan Devania Allyssa

Manager Iklan dan Promosi Maritza Adena

Manager Produksi dan Distribusi Aliyya Hana

Staf Perusahaan Wardah, Aprisa, Salfa, Nora, Hafizah, Harani, Rusydi, Devina, Aura, Sinta

Pemimpin Humas Ega Kustiarahma

Sekretaris Humas Naufal

Bendahara Humas Setya

Kasubdiv Internal Rizqi

Staf Internal Alya, Febi, Vinny, Vischa, Nasywa, Devio, Audy

Kasubdiv Eksternal Syifa Pramadina

Staf Eksternal Dina, Jofana, Ria, Valen, Putri, Adi, Tiolina, Ilya

Pemimpin Litbang M. Rakha Farras

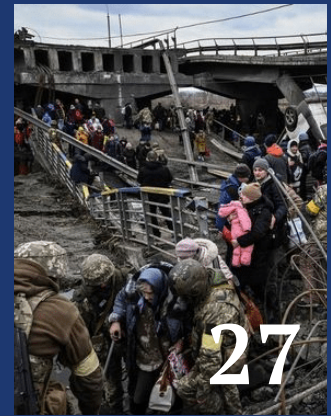
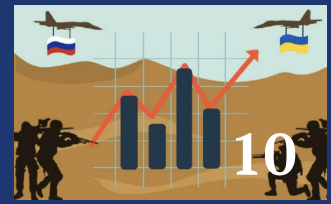
Kasubdiv Riset dan Kajian Brian

Staf Riset dan Kajian Erina, Naufal, Bintang, Farozdaq, Sekar, Nur Sopiah, Syifa, Intan, Rayhan, Rose

Kasubdiv Survei dan Olah Data Lerry

Staf Survei dan Olah Data Asri, Salwa, Maheza, Agatha, Siska, Isna, Devita

ISI DAFTAR



- 01 Catatan Dunia Baru Torehan Konflik Rusia - Ukraina
- 10 Menakar Dampak Konflik Rusia vs Ukraina terhadap Indonesia dalam Kacamata Ekonomi
- 16 Ukraina vs Rusia, Daud Lawan Jalut Masa Ini?
- 21 Romantisme Rusia dan Ukraina dalam Kebudayaan dan Gagasan Pemikiran Masa Lalu
- 27 Pedang Keadilan di Medan Perang: Menilik Hukum Humaniter pada Perang di Ukraina



- 33 Kata Mahasiswa di Balik Rusia-Ukraina
- 38 Nasionalisasi Perusahaan Milik Asing dan Implikasi Terhadap Perdagangan Internasional dalam Konflik Rusia - Ukraina
- 42 Korban Perang Rusia - Ukraina
- 43 Aleksandr Dugin: Siapakah Sosok yang Disebut Sebagai Otak Putin?
- 49 Merah Putih, "Untuk Merdeka Mereka Bersatu"
- 52 Galeri



CATATAN DUNIA BARU TOREHAN KONFLIK RUSIA - UKRAINA

<https://www.theatlantic.com/photo/2022/03/photos-day-eight-russian-invasion-ukraine/624170/>

Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengguncang politik global serta pasar internasional yang mengakibatkan krisis global serta membawa tantangan baru ke dalam bidang hubungan internasional. Hal ini akan mengakibatkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian di seluruh dunia. Invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina menjadi peristiwa global yang memiliki dampak besar bagi beberapa negara. Invasi Ukraina oleh Rusia pada 24 Februari 2022 juga menandai kembalinya perang antar negara yang belum pernah dialami Eropa sejak tahun 1945 karena perang antara Rusia dan Ukraina ini memiliki implikasi serius bagi pasar global yang berpotensi menghasilkan dampak berjenjang pada ekonomi di beberapa negara.

Sebelumnya, telah disinyalir oleh media bahwa faktor utama dalam meningkatnya ketegangan di antara kedua negara tersebut adalah terjadinya gerakan separatis Ukraina yang berada di Donetsk dan Luhansk untuk meminta bantuan kepada Rusia, serta isu bahwa Ukraina akan bergabung dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Hal ini dikabarkan menjadi alasan dari Presiden Rusia, Vladimir Putin untuk melakukan tindakan ekstrim, yaitu mengerahkan pasukannya dalam Operasi Militer Khusus di Ukraina. Sehingga, pada tanggal 24 Februari 2022, Vladimir Putin menyatakan secara resmi bahwa Rusia akan memulai operasi militernya. Pasukan militer Rusia menyerang sejumlah kota besar di Ukraina yang menyebabkan meletusnya agresi militer di antara kedua negara.

Invasi Rusia terhadap Ukraina tersebut menjadi salah satu konflik internasional yang paling disorot media di tahun 2022. Rusia dan Ukraina memang memiliki sejarah perseteruan yang panjang, meski sebetulnya pesimisme bahwa akan terjadi perang di antara keduanya cukup tinggi sehingga agresi militer dan pernyataan deklarasi dari Putin terhadap Ukraina menambah *shock factor* dari tindakan ini di mata internasional.



Adapun pembuatan tulisan ini bersumber dari Angga Pratama dan Aryo Wisnuwardhana selaku pengamat politik internasional sekaligus pengelola akun twitter @tweetmiliter yang sudah beroperasi sejak April 2012 bertemakan pembahasan masalah militer, keamanan, dan pertahanan negara. Keduanya dinilai mumpuni untuk mengulik fenomena Rusia - Ukraina tersebut serta membahasnya dari perspektif unik.

Di sepanjang perjalanan Negara Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, Putin mencoba untuk mempengaruhi negara-negara tetangganya, yakni negara bekas pecahan Uni Soviet yang mayoritas penduduknya beretnis Rusia. Dengan alasan itu, Putin menganggap bahwa Rusia berhak ikut campur dengan pemerintahan negara lain. Di Ukraina terjadi masalah multietnis, yang mana pada bagian barat terdapat rakyat dengan mayoritas etnis Ukraina, sedangkan bagian timur didominasi oleh rakyat dengan etnis Rusia. Keadaan multietnis menyebabkan ketegangan, yang mana etnis Rusia di Ukraina merasa ia bagian dari negara Rusia, sedangkan etnis Ukraina merasa negara ini tidak berbuat apa-apa bagi mereka, dilihat dari Presiden Viktor Yanukovych yang disinyalir pro-Rusia dan marak korupsi di masa kepemimpinannya. Etnis Ukraina lebih condong ke pihak Barat dengan berkeinginan untuk menggantungkan masa depan pembangunan ekonomi negara Ukraina pada Eropa Barat.

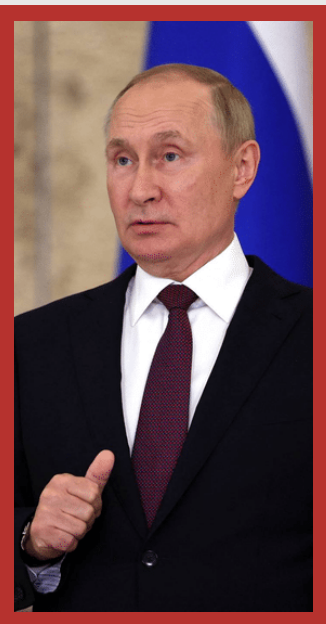


Suatu ketika, Ukraina menghadapi krisis ekonomi pada tahun 2013. Hal ini diperparah dengan maraknya korupsi di bawah pimpinan Presiden Yanukovych yang menggerogoti perekonomian Ukraina. Kondisi ini membuat warga Kiev marah sehingga mereka memunculkan sebuah revolusi yang akhirnya membuat situasi Ukraina menjadi tidak stabil pada tahun 2014. Instabilitas di Ukraina ini dilihat sebagai sebuah kesempatan oleh Rusia. Muncul istilah *little green men*, yaitu tentara Rusia tanpa identitas yang secara tiba-tiba menduduki Krimea. Pencaplokan ini dilakukan Rusia yang menganggap bahwa Krimea bukan milik Ukraina secara sah, melainkan Krimea hanyalah hadiah dari Nikita Khrushchev kepada Ukraina. Setelah Krimea diduduki, diadakan referendum yang mayoritasnya pro-Rusia. Dengan keberhasilan Rusia dalam okupasi Krimea ini, Rusia mereplikasikannya di daerah Donetsk dan Luhansk. Rusia membuat kerusuhan di kalangan rakyat yang pro terhadap Rusia yang menurut beberapa sumber adalah agen-agen FSB (Dinas Keamanan Federal Rusia), sehingga terlihat seakan-akan bahwa Donetsk dan Luhansk ingin merdeka.

Gerakan separatis yang dilakukan di Donetsk dan Luhansk ini berkaitan dengan sejarah dan etnis. Di wilayah Donetsk dan Luhansk memang banyak penduduk beretnis Rusia yang merasa dekat secara budaya dengan Rusia dibanding Ukraina, sehingga mereka mempunyai aspirasi untuk bergabung dalam federasi Rusia. Di sisi lain, Rusia sendiri ingin kedua wilayah ini merdeka karena penduduk di area tersebut mayoritas merupakan orang Rusia.



Selain warga Ukraina yang berminat untuk bergabung dengan Uni Eropa, ternyata di dalam negeri Ukraina juga bertebar isu berisi wacana untuk bergabung dengan NATO. Isu tersebut diduga membuat kekhawatiran Presiden Putin semakin menggebu-gebu hingga akhirnya memutuskan untuk menyerang Ukraina. Salah satu tujuan utama Presiden Putin dalam operasinya di Ukraina adalah supaya Ukraina tidak bergabung menjadi anggota NATO. Sebab di dalam Anggaran Dasar NATO, siapapun anggota NATO yang menerima serangan atau invasi negara lain, maka seluruh anggota lainnya akan membantu pertahanan negara tersebut. Putin diduga merasa terancam dengan implikasi politik dari isu bergabungnya Ukraina ke NATO. NATO berpotensi membangun instalasi peluru kendali di wilayah Ukraina bagian manapun, sehingga ancaman terhadap Rusia akan meningkat. Selain itu, Putin juga merasa kehilangan rasa keamanan karena negara-negara yang menjadi penyangga keamanan dan *sphere of influence*-nya menjadi bagian dari NATO. Pengakuan kemerdekaan yang diberikan Rusia kepada Donetsk dan Luhansk merupakan cara bagi Rusia untuk menekan Ukraina agar tidak bergabung dengan NATO.

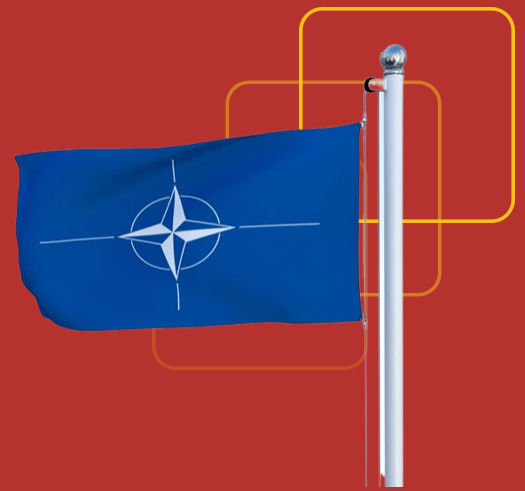


Sebagian besar warga Donetsk dan Luhansk lebih fasih berbahasa Rusia dan secara budaya memang lebih dekat kepada Moskow. Banyak warga di dua wilayah separatis Ukraina itu pun telah diberikan kewarganegaraan oleh Rusia, juga karena Rusia menganggap Ukraina sebagai bagian dari wilayahnya secara historis.





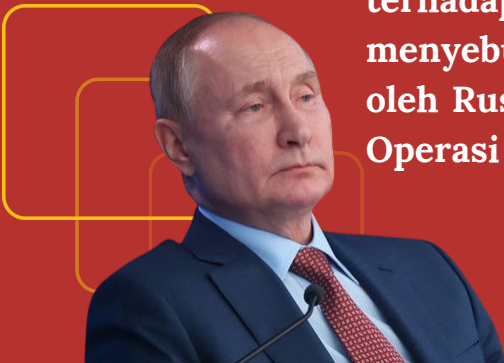
Namun, apakah keputusan yang diambil Ukraina untuk bergabung dengan NATO ini benar merupakan salah satu faktor penyebab konflik ini? Alasan tersebut ternyata dianggap hanyalah bualan dari Rusia saja.



“Keputusan untuk Ukraina daftar NATO atau tidak itu adalah hak prerogatif dari Ukraina sendiri dan hak prerogatif dari NATO sendiri. Ukraina kalau mau *apply ya apply*, NATO mau terima atau *ngga ya begitu* (tergantung NATO - *red*). Ini menjadi aneh ketika Ukraina mau *apply* (gabung) NATO tapi dilarang tetangganya (Rusia). Ini berarti sudah melanggar sistem kedaulatan, perkara itu mengancam Putin atau tidak. Negara Swedia dan Finlandia resmi bergabung dengan NATO awal bulan ini (Agustus), dan *udah* proses ratifikasi. Kalau Putin *beneran* takut sama NATO maka ia akan mengancam untuk menyerang kedua negara itu, tetapi kenyataannya tidak terjadi, *malahan* Putin bilang bahwa akses kedua negara ke NATO tidak masalah bagi mereka. Kalau misalnya perkara NATO, kenapa Ukraina yang belum gabung NATO *udah* diserang sedangkan Swedia dan Finlandia yang *udah* proses gabung NATO tidak diserang. Jadi, ada dugaan bahwa sebenarnya NATO hanya alasan saja dari Rusia untuk *nyerang* Ukraina,” ucap Angga Pratama.



Kemudian, ada satu lagi kejanggalan yang mana Rusia secara teknis tidak pernah mendeklarasikan perang terhadap Ukraina. Presiden Putin menyebut serangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina sebagai Operasi Militer Khusus.



“

“Dari segi politik internasional, operasi militer pasca Perang Dunia II itu tidak ada perang secara resmi antar 2 negara, termasuk keterlibatan Amerika di Vietnam maupun Perang Malvinas antara Inggris dengan Argentina. Tidak ada pernyataan perang resmi seperti dulu Inggris sekutu menyatakan perang kepada Jerman, atau seperti Amerika Serikat yang mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Paradigma perang menjadi seperti itu karena:

1. Pada dasarnya ketika suatu negara mendeklarasikan benar-benar perang, maka baik secara militer, politis, ekonomi semua akan dikerahkan untuk mencapai satu tujuan untuk memenangkan perang tersebut, seperti Amerika Serikat vs Jepang di Perang Dunia II, dimana Amerika mengganti ekonominya dari ekonomi damai menjadi ekonomi yang seluruh aspek produksinya ditujukan hanya untuk memenangkan perang tersebut.
2. Cara seperti itu apalagi perang di masa Perang Dunia, dimana semua negara punya arsenal nuklir tidak mungkin dilakukan di masa sekarang. Kalau misalnya Rusia secara resmi menyatakan perang terhadap Ukraina sebagai satu negara (konfliknya dieskalasi maka Ukraina selesai) dan Rusia punya hak penuh untuk menggunakan semua sumber dayanya untuk memenangkan perang tersebut termasuk nuklirnya. Seperti Amerika inter-

vensinya di Afganistan dan Irak, tidak ada *statement* menyatakan perang di dalamnya karena tujuan konflik sekarang itu bukan untuk mengeliminasi atau melakukan aneksasi penuh atas negara tersebut. Kalau dilihat lagi, sebenarnya niatnya Rusia itu cuma satu, yaitu mengganti rezim Zelensky dengan rezim yang Pro-Rusia. Pro disini dalam arti: 1) lebih *lining* secara politik internasional kepada Rusia, 2) mencari konsesi di Donetsk dan Luhansk yang sebagian besar penduduknya disitu beretnis Rusia.

Maka dari itu disebut Operasi Militer Khusus oleh Putin,” jelas Aryo Wisnuwardhana.



<https://iltalebano.com/2022/11/04/basta-propaganda-e-basta-tifo-da-stadio-e-una-guerra-contro-l-europa/>

”



“Dari segi politik internal, kenapa Rusia tidak *declare war*. Selama ini kalau yang ditangkap adalah Putin mem-*present* invasi mereka di Ukraina itu sebagai *Special Operation* kayak tontonan di TV aja bagi warga Rusia, sebagaimana invasi Amerika di Irak dan Afganistan. Tapi ketika mereka mobilisasi umum dan mendeklarasikan perang, kehidupan warga di Rusia bakal berubah, juga bisa berdampak pada stabilitas politik dalam negeri, dari sanksi yang diberi dari Amerika atau UE (Uni Eropa) atau Barat sekarang sudah cukup merusak ekonomi Rusia. Maka bila ditambah dengan mobilisasi perang, maka Putin takut akan menimbulkan instabilitas, *siapa tau* ada pemberontakan dalam Rusia dan bisa meruntuhkan posisinya. Intinya Putin tidak berani mobilisasi umum karena kedamaian masyarakat dan tontonan *Special Operation* yang mereka lihat di TV itu bisa berdampak pada mereka dan bisa timbul amarah dan ganggu stabilitas politik Putin yang sekarang sudah tidak stabil *gara-gara* perang ini,” tambah Angga Pratama.

Menurut kedua narasumber mengenai situasi kedepannya mengenai konflik ini ialah bergantung situasi lapangan apakah Ukraina sukses melakukan komprehensif ataupun nanti misalnya Ukraina gagal melakukan komprehensif lalu kondisi teritorialnya berubah. Namun, untuk sejauh ini, secara militer Ukraina lebih diuntungkan dengan pasukannya yang *balance*. Sebetulnya, belum ada para pakar yang bisa membuat persepsi atau menebak keberjalanan perang ini kedepannya. Namun, jika konflik selesai secara damai dalam kondisi sekarang maka diperkirakan Ukraina akan rugi, karena meski Rusia menanggung banyak korban jiwa tetapi Rusia memperoleh 20 persen dari lahan Ukraina. Apabila dilakukan gencatan senjata sekarang, dikhawatirkan Rusia akan mencoba invasi kembali dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan.



<https://www.ndtv.com/world-news/russia-ukraine-war-ukraine-civilians-evacuation-ukraine-says-reopening-humanitarian-corridors-for-evacuation-of-civilians-2887491amp/1>



Kondisi dan situasi penduduk sipil pada konflik Ukraina-Rusia pun diberitakan banyak yang telah melarikan diri ke luar negeri. Selain itu, ditunjukkan bahwa pihak berwenang Rusia telah menginterogasi, menahan, dan secara paksa mendeportasi sekitar 900.000 hingga 1,6 juta warga Ukraina (termasuk 260.000 anak-anak) dari rumah mereka ke Rusia. Selain itu, banyak sanksi yang diberikan kepada Rusia yang menyulitkan masyarakat, seperti tidak bisa pergi ke Eropa. Berbagai dampak sanksi dialami oleh Rusia semenjak operasi militernya dimulai, seperti aktivitas pencairan sebagian besar aset Rusia diblokir demi mencegah Rusia memanfaatkan dana kekayaan negara daruratnya, *National Wealth Fund (NWF)*. Selain itu, Rusia juga dibekukan dari keanggotaan *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT)* atau jaringan keuangan dunia, sehingga warga negaranya tidak bisa melakukan transaksi keuangan elektronik di luar Rusia. Akibat sanksi yang diberikan, Rusia juga tidak bisa berdagang dengan negara lain.



<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/etre-et-savoir/comment-paier-de-la-guerre-en-ukraine-aux-enfants-8731469>

Sementara itu, Ukraina juga tidak kalah terdampaknya. Terjadi kelangkaan komoditas akibat hilangnya pasokan dari perdagangan dengan Rusia dan Ukraina. Dampak yang mulai sudah terjadi yakni harga-harga komoditas utama seperti minyak bumi, gas, dan bahan tambang mengalami kenaikan cukup tinggi. Begitu Rusia menyerang Ukraina, harga minyak dunia melonjak melampaui US\$ 100 per barel dan saham Asia-Pasifik, Eropa, dan Wall Street langsung merosot. Krisis politik yang berkepanjangan tentu akan membuat harga minyak mentah makin melesat dan tentu akan berdampak serius terhadap perekonomian global.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menegaskan, bahwa operasi militer khusus Rusia di Ukraina akan selesai segera setelah tujuannya tercapai. Lavrov menunjukkan bahwa tujuan operasi militer Rusia yaitu untuk mempertahankan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk dan memastikan bahwa tidak ada ancaman terhadap keamanan penduduk di wilayah itu serta keamanan Rusia yang akan datang dari wilayah Ukraina. Akhir kata, jika Rusia benar-benar menduduki Ukraina, hal ini akan menjadi contoh dan inisiatif bagi negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama seperti Cina ke Taiwan.



Penulis:



Vanya Jasmine & Carissa Maharani





MENAKAR DAMPAK KONFLIK RUSIA VS UKRAINA TERHADAP INDONESIA DALAM KACAMATA EKONOMI

Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengguncang politik global serta pasar internasional yang mengakibatkan krisis global serta membawa tantangan baru ke dalam bidang hubungan internasional. Hal ini akan mengakibatkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian di seluruh dunia. Invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina menjadi peristiwa global yang memiliki dampak besar bagi beberapa negara. Invasi Ukraina oleh Rusia pada 24 Februari 2022 juga menandai kembalinya perang antar negara yang belum pernah dialami Eropa sejak tahun 1945 karena perang antara Rusia dan Ukraina ini memiliki implikasi serius bagi pasar global yang berpotensi menghasilkan dampak berjenjang pada ekonomi di beberapa negara.

Saat ini, dunia masih belum benar-benar pulih setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda tiga tahun terakhir ini. Namun nyatanya, dengan adanya pandemi Covid-19 memberikan beberapa hantaman dalam bidang perekonomian di beberapa negara belahan dunia. Kemudian, dilanjutkan dengan adanya deklarasi Presiden Vladimir Putin yang mengeluarkan instruksi untuk melakukan operasi militer kepada Ukraina yang memunculkan banyak asumsi bagi negara-negara bahwa Rusia telah menginvasi Ukraina. Sehingga dengan demikian, mulai munculah ketidakpastian perekonomian di berbagai sektor. Sejumlah negara yang saat ini masih berjuang dan beradaptasi dari dampak pandemi Covid-19 justru terkena imbas dari konflik dua negara tersebut.

Adapun Rusia dan Ukraina merupakan aktor penting dalam komoditas pasar minyak, gas, gandum, energi, makanan, dan pupuk global dewasa ini. Rusia merupakan produsen dan pengekspor minyak terbesar ketiga di dunia, pengekspor gas bumi terbesar kedua, dan pengekspor batu bara terbesar ketiga. Rusia juga merupakan pengekspor gandum terbesar di dunia dan pengekspor minyak bunga matahari terbesar kedua. Selain itu, Rusia juga mendominasi perdagangan pupuk global dan menjadi pengekspor pupuk terbesar di dunia. Ukraina tak kalah pentingnya juga dalam memenuhi pasar global seperti sebagai negara pengekspor minyak bunga matahari terbesar, pengekspor jagung terbesar keempat, dan pengekspor gandum terbesar kelima. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa pada dasarnya Rusia dan Ukraina memiliki peran penting di sektor ekonomi baik di kawasan Eropa maupun Asia termasuk Indonesia. Oleh sebab itu konflik Rusia vs Ukraina tentu memberikan dampak berantai atau *multiplier effect* terhadap perekonomian global.



<https://www.orfonline.org/expert-speak/russia-ukraine-war-economic-sanctions-and-global-headwinds/amp/>

Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina disebabkan oleh Rusia yang menganggap bahwa adanya keinginan dari Ukraina untuk bergabung dengan NATO (sebuah organisasi pertahanan Atlantik Utara) merupakan sebuah ancaman bagi Rusia. Negara yang dianggap sebagai negara *super power* di dunia, Amerika Serikat, tentu saja mengecam invasi oleh Rusia hal ini dilakukan dengan memberikan beberapa sanksi ekonomi terhadap Rusia. Salah satu sanksi yang diterima Rusia adalah embargo minyak mentah oleh negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Respon Rusia terhadap sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika ialah dengan melarang ekspor lebih dari 200 produk Rusia. Sanksi embargo minyak bumi yang diberikan negara Uni Eropa dan Amerika Serikat kepada Rusia diketahui akan berdampak pada kelangkaan minyak di dunia. Oleh karena itu, harga minyak bumi akan mengalami peningkatan drastis, sebagaimana yang ditunjukkan pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di beberapa negara. Indonesia juga turut merasakan dampak dari kenaikan harga minyak bumi tersebut dengan kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada awal bulan Maret 2022.



Volodymyr Zelenskyy held a meeting on the development of the Ukrainian economy in wartime. (51977044802).jpg

Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat memproduksi minyak bumi dalam negeri. Meski memproduksi minyak buminya masih hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi sayangnya produksinya terus menurun, sehingga apapun keadaannya minyak mentah pun harus diimpor dari luar negeri untuk bisa diolah di kilang minyak dalam negeri. Saat ini Indonesia masih mengimpor minyak dari berbagai negara. Salah satu negara yang mengimpor minyak terbesar di Indonesia adalah Singapura. Namun, mirisnya minyak mentah yang didapatkan Singapura salah satunya merupakan hasil dari sumur-sumur yang berada di Indonesia dan beberapa negara lain salah satunya adalah Rusia.

Sementara itu, 40% kebutuhan energi di Eropa dipenuhi oleh Rusia. Eropa dapat melakukan proses produksi jika kebutuhan energi sudah terpenuhi. Oleh karena itu, jika kebutuhan energi menurun, maka proses produksi juga ikut menurun padahal penghasilan negara mereka yang terbesar berasal dari industri. Hal ini berakibat pada pendapatan negara yang juga turut menurun yang berimbas pula pada proses impor ke Indonesia. Sehingga, Indonesia terdampak dalam penekanan distribusi dari sisi pangan dan sisi energi.



Selain kenaikan harga bahan bakar minyak, mayoritas kenaikan harga pangan di Indonesia merupakan dampak lainnya dari terhambatnya perdagangan antara Indonesia dengan Ukraina dan Rusia. Tidak hanya Rusia yang memberi dampak ekonomi, tetapi juga Ukraina sebagai pemasok gandum terbesar bagi Indonesia juga membawa dampak yang besar pula. Hal tersebut didukung dengan Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa Ukraina memasok 2,96 juta ton gandum atau setara 27% dari total 10,29 juta ton yang diimpor Indonesia pada tahun 2020. Oleh karena itu, dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina ini akan berdampak langsung pada terganggunya pasokan gandum impor dari Ukraina.

Selanjutnya, konflik ini juga akan menyebabkan kenaikan harga gandum secara global yang kemudian akan berimbas pada industri pangan dalam negeri bagi mereka yang membutuhkan gandum sebagai bahan bakunya seperti mie, tepung terigu, roti, kue, dan lain-lain. Namun dalam hal naiknya harga gandum, Indonesia tidak terlalu resah karena seperti yang diketahui bahwa makanan pokok penduduk Indonesia bukanlah gandum, melainkan beras. Oleh karena itu, selagi kebutuhan beras di Indonesia masih tercukupi maka penduduk Indonesia tidak akan mengalami kekurangan pangan.

Mengenai pembahasan dalam tulisan ini, tim penulis telah menghubungi salah satu akademisi Universitas Diponegoro (Undip), Hendro Saptono, S.H., M.Hum. Beliau adalah seorang Dosen Hukum Bisnis yang bertugas mengajar di Fakultas Hukum (FH) Undip dan telah mempublikasikan berbagai macam jurnal terkait ekonomi internasional. Dalam wawancaranya, beliau menegaskan bahwa,



Indonesia tidak akan mengalami krisis pangan karena Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, apapun yang ditanam di tanah Indonesia pasti akan tumbuh.



<http://thebeautifuloccupation.com/photo-journal-village-life-the-real-bali/>

“Karena dengan adanya dua konflik Rusia vs Ukraina yang menghasilkan produk-produk yang berhubungan dengan pangan dan energi, sehingga konflik tersebut akan menekan distribusi energi dan pangan, yang mana kita memahami bahwa dua negara tersebut merupakan penghasil energi dan pangan terbesar.” tegas Hendro Saptono.

Tidak hanya Indonesia yang ikut merasakan dampak dari meletusnya konflik Rusia vs Ukraina, tetapi beberapa negara di kawasan Asia Tenggara lainnya juga terkena imbas ekonomi. Rusia menjadi mitra dagang terbesar kesembilan untuk kawasan Asia Tenggara sejak tahun 2019. Dampak yang dirasakan Indonesia juga dirasakan oleh negara Asia Tenggara lainnya yang memiliki ketergantungan atas minyak, gas, dan gandum dari Rusia. Sebagian besar negara ASEAN merasakan dampak dari perang tersebut khususnya dalam kenaikan harga minyak untuk industri transportasi.





<https://amp.kompas.com/otomotif/read/2020/07/06/153100515/sambut-new-normal-konsumen-spbu-shell-bisa-dapat-gratis-bensin>

Diketahui bahwa harga BBM nonsubsidi apabila dikonversikan ke Rupiah di berbagai negara ASEAN ialah sebagai berikut: di Singapura sebesar Rp28.500/liter, Thailand Rp19.300/liter, Laos Rp19.200/liter, Filipina Rp18.500/liter, Vietnam Rp16.800/liter, Kamboja Rp16.500/liter, dan Myanmar Rp15.300/liter. Dengan demikian, pengaruh dari perang Rusia dan Ukraina memiliki dampak langsung bagi perekonomian negara di Asia Tenggara khususnya dalam minyak bumi karena Rusia menjadi negara pengeksportir lebih dari 10%. Jika membandingkan kondisi perekonomian Indonesia dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih dalam tahapan yang wajar karena Indonesia tidak bergantung pada Rusia maupun Ukraina.



<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2022093011006-20-854823/mahasiswa-balas-tuduhan-moeldoko-sok-dermo-bbm-bela-orang-kaya>

“Indonesia merasakan imbasnya karena Indonesia negara importir dari beberapa negara dimana proses impor dari beberapa negara tersebut terhambat karena kelangkaan bahan bakar minyak yang menjadi sumber transportasi atau mobilitas.” jelas Hendro ketika dikonfirmasi mengenai keterkaitan komoditas Indonesia dengan konflik.

Di sisi lain, Indonesia juga memiliki peluang baru yang positif imbas dari Perang Rusia vs Ukraina. Untuk sejumlah komoditas Indonesia tidak hanya menjadi importir, tetapi juga dapat menjadi eksportir bagi komoditas seperti *Crude Palm Oil* (CPO), batu bara, dan nikel. Dengan adanya kenaikan harga di dunia, maka Indonesia dapat berperan untuk menggantikan Rusia yang mendapat embargo dari sejumlah negara dalam hal ekspor komoditas tersebut. Dengan adanya peluang tersebut, Indonesia tidak hanya melihat harga di pasaran dunia, namun Indonesia masih tetap harus menjaga pemenuhan DMO di dalam negeri dan menjaga kebutuhan energi di dalam negeri. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa ekspor di Indonesia dibatasi supaya kebutuhan di dalam negeri tetap terpenuhi.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190220063330-32-370896/jejak-para-purnawirawan-di-pusaran-bisnis-tambang-dan-sawit>



Melesatnya harga minyak tentunya memberatkan APBN. Dalam perhitungan APBN 2022, harga ICP (*Indonesian Crude Price*) ialah sebesar USD 63\$ per barel, sementara harga *crude oil* di pasar sudah mencapai USD 100\$ per barel. Perbedaan harga aktual antara minyak mentah dunia dan ICP adalah faktor riil yang menggerus likuiditas pemerintah. Untuk menghadapi permasalahan ekonomi akibat dari perang Rusia vs Ukraina, pemerintah berusaha menahan kenaikan harga pangan dan energi melalui *windfall tax* dari ekspor mineral, perkebunan, dan PPN untuk menanggung beban fiskal APBN akibat subsidi yang dikeluarkan. Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan produksi untuk ketersediaan pasokan pangan dan energi dalam negeri, melakukan konversi energi yang ramah lingkungan, memastikan perluasan insentif harga gas khusus untuk industri prioritas, serta meningkatkan pengawasan atas distribusi komoditas pangan dan energi agar tepat sasaran.

<https://gis.huri.harvard.edu/ukraine-and-russia-together-or-apart>

Konsen bagi dunia dan Presiden Jokowi sebagai Presiden G20 melihat bahwa perekonomian tidak akan bergerak dan berjalan apabila tidak dilakukannya gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Oleh karena itu, Indonesia sudah berupaya untuk melakukan upaya perdamaian agar terjadi gencatan senjata. Sikap Indonesia dalam menghadapi persoalan invasi Rusia ke Ukraina sudah sesuai dengan sikap politik luar negeri yang bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif yang dimaksudkan adalah Indonesia tidak akan memihak kepada negara lain ketika terjadi penjajahan, invasi, atau pun konflik karena Indonesia tidak mendukung hal tersebut dan Indonesia akan secara aktif mendukung perdamaian dunia. Disebabkan alasan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif inilah sehingga Rusia tetap melakukan hubungan perdagangan dengan Indonesia.



Penulis:

Nora Lakia & Adi Tri





UKRAINA VS RUSIA, DAUD LAWAN JALUT MASA INI?





Menurut Penasihat Presiden Ukraina dan negosiator pembicaraan damai, Mykhailo Podolyak, dalam dialog untuk menghentikan perang antara dua negara, ada 3 (tiga) komponen penting yang menjadi pokok pembicaraan yaitu pemberlakuan gencatan senjata segera, perjanjian terkait gencatan senjata, dan penetapan jalur kemanusiaan untuk mengevakuasi warga sipil di Ukraina. Setelah negosiasi selesai, hasilnya tidak bisa memuaskan kebutuhan Ukraina sama sekali karena hanya menghasilkan solusi untuk pengaturan koridor kemanusiaan. Gencatan senjata pun tidak menjadi kesepakatan di antara mereka. Perang akan selesai hanya sampai benar-benar ada yang kalah.

Jika melihat data dari *Global Firepower*, Ukraina akan jauh terpelanting ketika dibandingkan dengan Rusia dalam kategori negara yang mempunyai pertahanan terbesar, sebab Rusia berada di urutan kedua, sementara Ukraina ada di nomor 25. Secara dana yang kedua negara anggarkan pun membuat Ukraina yang hanya menganggarkan US\$9,6 juta diungguli oleh Rusia dengan anggaran US\$42,1 juta per tahunnya. Fakta tentang ketimpangan kekuatan tersebut tentunya membuat kita berpikir Rusia akan dengan mudah menginvasi Ukraina. Tapi, pernahkah kalian mendengar kisah Daud yang berhasil mengalahkan Jalut dengan hanya batu yang dilontarkan dari ketapel saja? Mungkinkah Ukraina punya kesempatan yang sama?

2022 Military Strength Ranking

GFP | ANNUAL RANKING

Ranking the total available active military manpower by country, from highest to lowest.

The finalized Global Firepower ranking below utilizes over 50 individual factors to determine a given nation's PowerIndex (PwrIndex) score with categories ranging from military might and financials to logistical capability and geography.

Our unique, in-house formula allows for smaller, more technologically-advanced, nations to compete with larger, lesser-developed ones and special modifiers, in



Walaupun tertinggal dalam segi dana, Ukraina juga digadang-gadang memiliki senjata ampuh yang bisa mengungguli Rusia: rudal anti tank Javelin ATGM (buatan amerika serikat, beroperasi 1996). Si Javelin ini merupakan rudal anti tank portabel jenis *fire-and-forget* yang mempunyai panduan inframerah otomatis sehingga memungkinkan Ukraina untuk mencari perlindungan segera setelah peluncuran.

Tak hanya rudal Javelin, Ukraina juga punya Anti Tank Next Generation Light anti-Tank Weapon (NLAW) yang merupakan buatan Swedia dan Inggris, beroperasi pada tahun 2009. Senjata ini merupakan rudal anti tank jarak pendek yang dirancang dengan bobot yang tidak seberat rudal anti tank pada umumnya. NLAW dapat dimanfaatkan oleh Ukraina untuk mengincar tank tempur utama Rusia dalam jarak yang dekat dan dianggap lebih efisien karena dapat dioperasikan dari bahu satu personel saja. Selain itu, NLAW juga dapat digunakan untuk menyasar objek lainnya seperti truk atau helikopter dalam mode serangan langsung. Sayangnya, jika dibandingkan Javelin yang punya jarak maksimum peluncuran rudal 2.500 meter dan belakangan dikembangkan sampai 4.750 meter, NLAW akan kalah dengan spesifikasinya yang hanya punya jangkauan hulu ledak 600 meter dari stasioner dan jangkauan efektif terhadap target bergerak hingga 400 meter.



<https://www.thedrive.com/the-war-zone/45131/the-fim-92-stinger-sam-may-finally-get-a-replacement>

Senjata andalan Ukraina selanjutnya adalah Fim 92 Stinger (buatan Amerika Serikat, beroperasi 1981). Senjata ini merupakan sebuah peluru kendali darat ke udara. Stinger sudah tidak lagi diproduksi sehingga semua stinger yang tersisa di dunia ini merupakan hasil cuci gudang dari militer Amerika Serikat ataupun NATO. Dilihat dari usianya yang tua dan sudah mandek reproduksi, Stinger ini juga digunakan pada Falklands War, invasi Soviet terhadap Afghanistan, Perang Sipil Angola, Kargil War, dan Yugoslav Wars. Sama seperti NLAW, kelebihan dari FIM 92 Stinger ialah bobotnya yang ringan sehingga meningkatkan mobilisasi dari operatornya. Sebagai rudal dengan target di udara, FIM 92 Stinger ibarat versi *upgrade* dari FIM-43 Redeye yang telah dihentikan produksinya pada tahun 1969. Stinger punya kecepatan tinggi serta daya jangkau yang lebih jauh dibanding Redeye, jarak tempuh efektifnya mencapai 8 kilometer. Kelebihan lain dari Stinger adalah kemampuan deteksi kendaraan udara milik sekutu yang berguna untuk menghindari *friendly fire*.



<https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/javelin.html>

The last but not the least, Ukraina juga punya Bayraktar TB-2 (buatan turki, beroperasi 2014). Senjata ini mungkin terbilang baru dibandingkan dengan senjata-senjata tua yang telah disebutkan sebelumnya. Bayraktar TB2 baru menjalani uji coba dengan berbagai persenjataan pada Desember 2015 dan pertama kali digunakan oleh Militer Turki pada tahun 2018. Walaupun umurnya masih belia, pada operasi kontra-terorisme terhadap pemberontak Kurdi, si Bayraktar ini berhasil mencederai kurang lebih 449 jiwa. Bayraktar merupakan dron tempur *Medium Altitude Long Endurance* yang dilengkapi beberapa persenjataan antara lain bom pintar berpemandu laser *Milli Akıllı Mühimmat* (MAM) varian MAM-C dan MAM-L, rudal anti tank L-UMTAS, rudal berpemandu laser Roketsan Cirit, serta rudal berpemandu laser TUBITAK-SAGE BOZOK. Bayraktar juga bukan sembarang drone, ia dapat mengangkut persenjataan sampai seberat 150 kilogram. Persenjataan tersebut dapat dipasang pada empat titik pegangan yang terletak di sayap Bayraktar TB-2.



<https://indonesiadefense.com/perkuat-pertahanan-negara-serbia-lirik-drone-bayraktar-tb2-turki/>

Selama dioperasikan oleh Ukraina, senjata terbang itu telah menyerang dan menghancurkan dua kapal patroli *Raptor Class* milik Rusia di dekat Pulau Ostriv Zmiinyi. Pada 7 Mei silam, sebuah helikopter angkut Mil Mi-8 milik Rusia yang sedang menurunkan pasukan di Pulau Zmiinyi juga berhasil diserang dan dihancurkan olehnya. Masih di pulau yang sama, Bayraktar sukses menjadi penghancur rudal pertahanan udara Tor milik Rusia dan membuka jalan bagi Angkatan Udara Ukraina untuk melakukan pengeboman yang dilakukan oleh pesawat Sukhoi Su-27 'Flanker' milik Ukraina terhadap bangunan di pulau itu.

Persenjataan Ukraina tidak datang begitu saja. Ukraina dipersenjatai oleh negara-negara lain, salah satu yang paling sering berseliweran beritanya tidak lain ialah oleh Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, rupanya tidak mau meninggalkan kawannya diserang oleh negara tetangga tanpa persiapan yang cukup. Diketahui, Joe Biden telah menandatangani paket senjata baru senilai US\$150 juta untuk Ukraina. Paket senjata itu berisi amunisi 25.000 peluru artileri 155mm, radar kontra-artileri, peralatan *jamming*, dan peralatan lapangan disertai suku cadang yang ditujukan untuk membantu Kyiv mengusir invasi Rusia.

Sebelumnya, Amerika Serikat juga sudah mengirimkan persenjataan senilai USD\$3,4 miliar yang mana di dalamnya sudah termasuk howitzer, sistem Stinger anti-pesawat, rudal Javelin anti-tank, amunisi, dan drone 'hantu' yaitu Phoenix Ghost. Senjata yang terakhir tadi diklaim muat untuk masuk ke dalam tas ransel dan dapat terbang dengan durasi 6 jam. Jumlah senjata tersebut pun diberikan dengan jumlah tak tanggung-tanggung, yaitu 580 unit drone.

Memiliki banyak *teman*, Ukraina tidak hanya dibantu oleh Amerika Serikat. Walaupun Kementerian Pertahanan Inggris tidak mengumumkan detail jenis dan jumlah dari bantuan sistem senjata yang mereka kirim untuk Ukraina, tapi artileri musim panas seperti M270 *Multiple Launch Rocket System* dari Inggris dianggap memberi daya guna bagi Ukraina untuk mengembalikan pertahanannya pada sejumlah wilayah. London juga telah mengumumkan pada awal Juni 2020 bahwa mereka telah meluncurkan program ekstensif bagi tentara dari Ukraina untuk berlatih mengoperasikan jenis senjata tersebut.

Tak mau ketinggalan, Jerman juga turut menyumbang. Sejumlah sistem radar pendeteksi artileri Cobra serta sistem pertahanan udara IRIS-T SLM yang dipegang Ukraina disebut-sebut ialah kiriman dari Jerman. Seolah mengiyakan, Kementerian Pertahanan Jerman juga mengirimkan 20 tank anti pesawat GEPARD. Pasukan dari Ukraina yang akan mengoperasikannya bahkan dilatih oleh Jerman pada musim panas. Jerman pun mengajak satu teman lain, Belanda, untuk mengirimkan sepuluh Panzerhaubitze 2000 dan melatih tentara Ukraina untuk mengoperasikan perangkat ini.

Tidak perlu jauh-jauh, negara-negara di Uni Eropa selaku tetangga Ukraina bisa terhitung sebagai pemberi bantuan nomor satu kepada Ukraina, baik secara militer maupun sipil. Negara-negara tersebut antara lain adalah Estonia, Latvia, Polandia, dan Lithuania. Bahkan sejak dimulai invasi Rusia kepada Ukraina, Polandia tercatat telah menyerahkan 200 lebih tank buatan Soviet ke Kyiv.

Ukraina mungkin akan jauh terlihat lebih lemah dibanding Rusia ketika berdiri sendiri. Nyatanya, tak bisa dipungkiri bahwa Ukraina masih bisa bertahan sampai dengan sekarang dari gempuran invasi yang dilakukan oleh Rusia dikarenakan bantuan dari negara sekutunya. Persenjataan yang dikirim oleh negara-negara tersebut pun telah dimanfaatkan dengan strategi yang apik sehingga Ukraina bisa terus merebut kembali apa yang telah direnggut oleh Rusia.

Kalau begini, siapa yang Daud dan siapa yang Jalut, ya?



Penulis:



Maulisna Ainun Nisa, Faizal Rohman, Isna Ayu



<https://www.bbc.com/persian/world-features-61125775.amp>

ROMANTISME RUSIA DAN UKRAINA DALAM KEBUDAYAAN DAN GAGASAN PEMIKIRAN MASA LALU



<https://www.bbc.com/news/world-europe-61757667.amp>

Pembahasan Rusia dengan Ukraina seakan tidak ada habisnya akhir-akhir ini. Hal ini dipicu oleh permasalahan perang sejak dimulainya “operasi militer khusus” Rusia ke Ukraina yang berawal pada 2014 sampai sekarang ini. Akan tetapi, bila kita melihat sejarah yang telah terjadi pada masa lampau, diketahui bahwasanya Rusia dan Ukraina pernah tergabung dalam negara yang menjadi satu kesatuan dengan nama Uni Soviet.

Menurut Marten Hanura, seorang pakar Hubungan Internasional, persatuan sejarah antara Rusia dan Ukraina terjadi pada abad ke-18 saat Uni Soviet masih bersifat kekaisaran atau dikenal dengan peradaban Kievskaya (Rus Kievan) yang merupakan awal peradaban bangsa serumpun yang menghuni Ukraina, Belarusia, dan Rusia.



Marten yang saat ini aktif mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Diponegoro menuturkan bahwa Kekaisaran Rusia terus mengalami perkembangan menjadi kesatuan Uni Soviet yang didalamnya terdapat berbagai etnis, salah satunya adalah di wilayah Slavia yang memiliki 3 (tiga) ras besar di dalamnya dan menyebabkan Rusia dan Ukraina memiliki beberapa kesamaan kebudayaan.

“Dahulu sebelum Uni Soviet runtuh, tentunya Rusia dan Ukraina berada dalam kekaisaran yang sama, yang kemudian lambat laun berubah menjadi kepangeranan. Bahkan, pusat peradaban (kekaisaran tersebut) berada di Kiev yang saat ini merupakan ibukota Ukraina.” jelas Marten yang juga menempuh pendidikan magisternya secara langsung di Rusia selama tiga tahun.

Meski demikian, di antara keduanya juga memiliki perbedaan yang dinilai menjadi akar perpecahan antara Rusia dan Ukraina dari segi budaya. Perbedaan tersebut misalnya dalam penggunaan bahasa, yaitu Berus yang merupakan bahasa Belarusia, Malikirus yang adalah bahasa yang dipakai oleh Ukraina, dan Russkiy Yazyk yang merupakan bahasa Rusia yang dipakai saat ini. Sehingga, dalam pengelompokan etnis tersebut terdapat banyak perbedaan dalam kebudayaannya, meski berada dalam satu rumpun yang sama yakni Slavia.

“Terdapat banyak etnis, sama seperti Indonesia yang dihuni oleh banyak etnis (multietnis), begitupun dengan Uni Soviet dahulu. Secara umum, disinilah letak perbedaan Rusia dan Ukraina yaitu pengelompokan etnis yang mereka miliki, meskipun dengan rumpun yang sama yakni Slavia.” terang pengajar mata kuliah Studi Eropa tersebut.

Terpecah belahnya kedua negara tersebut juga disebabkan oleh banyaknya perbedaan dan pergolakan, terkhusus dari Mongol. Sebagai pemicu terkuat, hal ini dikarenakan setelah bangsa Mongol menyerang Rusia, ibukota Kiev dipindah ke Moskow dan menjadi salah satu faktor runtuhnya Kekaisaran Rusia yang terjadi pada 1917 setelah peristiwa Revolusi Bolshevik atau Revolusi Oktober.

“Meski satu kekaisaran, pergolakan dan perpecahan bukan suatu yang jarang terjadi di Soviet. Pergolakan tersebut yang akhirnya membuat bagian terbesar (negara pecahan Soviet) menjadi Rusia dan sisanya menjadi negara-negara bagian lain.” lanjut beliau.

Akan tetapi, pengaruh kota Kiev sebagai kota pertama yang dibangun megah dan menjadi pusat peradaban tidak bisa dihilangkan begitu saja. Selain itu, lokasinya yang strategis dekat Konstantinopel menjadikan kota Kiev penting dalam menyuplai rempah-rempah dan kebutuhan pokok lainnya. Di abad pertengahan dan awal modern, daerah aliran sungai Volga menjadi pintu masuk bagi kekaisaran Rusia, selain itu masyarakat yang beretnis Rusia juga menyebar di bekas kerajaan Kievan Rus.

Runtuhnya Rus Kievan menyebabkan terpecahnya beberapa negara bagian. Diantara negara tersebut, salah satu negara yang paling kuat ialah Rusia, sedangkan Ukraina membentuk republik sendiri tetapi tetap di bawah Uni Soviet. Meski demikian, dengan adanya negara-negara yang terpecah membuat kekaisaran kewalahan dalam mengurusnya, sehingga dibentuklah kepangeranan di wilayah Ukraina serta wilayah lainnya sebelum menjadi negara yang merdeka. Kemudian, pada 14 Februari 1992, Rusia dan Ukraina bersama-sama mendirikan hubungan diplomatik yang berujung dengan kesepakatan Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Kemitraan antara Rusia dan Ukraina tahun 1997. Melalui kesepakatan tersebut, hubungan bilateral diantar keduanya dalam bidang sosial, militer, ekonomi, dan politik terjalin. Akan tetapi, pada akhir 2004 hingga Januari 2005 mulai terjadi aksi protes di Ukraina. Demonstrasi yang terjadi di Ukraina didasari oleh masalah korupsi yang terus terjadi selama bertahun-tahun sejak Presiden Leonid Kuchma memimpin. Alhasil, Presiden Leonid memutuskan melepas jabatannya dan digantikan oleh Presiden Viktor Yushchenko. Sejak pergantian kepemimpinan, hubungan antara Rusia dan Ukraina mulai mengalami pasang surut.

Adapun Ukraina termasuk dalam bagian timur Polandia - Lithuania sehingga terdapat banyak aspek bahasa Polandia yang masuk kedalamnya. Sebaliknya, Moskow menyatukan kota-kota di bagian utara dan timur sehingga menjadi sebuah negara merdeka yang disebut Rusia. Oleh sebab itu, bahasa Rusia dibentuk melalui kontak dengan imigrasi dari daerah ke timur dan mengimpor istilah teknis dan budaya dari Eropa Barat seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Sewaktu Rusia menguasai Ukraina pada abad ke-18, pengucapan di kedua kawasan tersebut sudah tidak lagi saling berkaitan erat. Kemudian, muncul perubahan yang besar dalam aspek kosakata, bunyi, dan tata bahasa, akan tetapi kini Rusia dan Ukraina berbagi lebih banyak kesamaan bahasa daripada pengguna bahasa Slavonik lainnya. Pemakaian alfabet Cyrillic menjadi bukti bahwa kedua negara tersebut menggunakan bahasa yang sama, hanya saja terdapat beberapa perbedaan versi. Diketahui bahwa ada empat huruf di bahasa Ukraina yang tidak ada dalam Bahasa Rusia (ґ, є, і, ї) dan empat huruf di bahasa Rusia yang tidak ada dalam bahasa Ukraina (ѐ, ъ, ы, э).



“Pada umumnya bahasa dalam imperium tersebut ya sama, ada bahasa induknya. Tetapi masing-masing juga memiliki bahasa sendiri, ada perbedaan. Inilah yang disebut dengan budaya yang dipengaruhi oleh negara lain, dalam hal ini bahasa induk ialah bahasa Rusia meskipun Ukraina memiliki bahasanya sendiri.” terang Marten ketika kami meminta keterangan mengenai kesamaan bahasa di antara kedua negara yang sedang berkonflik tersebut.

Bahasa Rusia dan Ukraina diketahui terpisah dari satu sama lain semenjak kurang dari seribu tahun lalu sehingga keduanya masih memiliki banyak persamaan kosakata dasar dan inti, tetapi tidak cukup kuat untuk disebut sebagai dialek. Sejarah panjang Rusia sebagai bahasa politik dan budaya yang dominan di Uni Soviet membuat banyak warga Ukraina (dalam sensus terakhir sekitar 30 persen) merupakan penutur asli bahasa Rusia. Meskipun bahasa masing-masing wilayah digunakan di wilayahnya sendiri, tetapi terdapat bahasa wajib yang dipelajari di sekolah yaitu bahasa Rusia.

Sementara itu, berbeda pula halnya dalam kesenian. Musik di wilayah Eropa Timur, misalnya, yaitu musik balada yang merupakan musik asli dan berbeda dengan musik barat. Kemudian dalam kesenian tari terdapat kesamaan dalam pakaiannya karena di Rusia terdapat banyak etnis yang salah satunya merupakan etnis Ukraina.

“Keduanya saling melengkapi karena (bersifat) multietnis. Rusia tidak tunggal (etnisnya), salah satu etnis Rusia ialah Ukraina, sehingga bisa dikatakan bahwa tarian dari Ukraina juga merupakan tarian Rusia.” tutur Marten.

Apabila dilihat dari segi historis, perang yang dilakukan Rusia ke negara-negara Slavik dimotivasi oleh klaim bahwa Rusia adalah pewaris sah kerajaan Kievan Rus dan Bizantium di Abad Pertengahan. Sehingga secara historis kesadaran ini melekat secara kuat dan membentuk jiwa nasionalisme yang berlebihan. Kemudian, secara kultural Ukraina dipandang sebagai separuh identitas Rusia. Akan tetapi, geografis yang berdekatan dengan Eropa membuat Ukraina juga terpengaruh oleh budaya Eropa. Alhasil, Ukraina adalah negara yang memiliki keunikan karena di satu sisi memiliki identitas kultural sebagai “Barat” tetapi di sisi lain merupakan bagian kultural dari “Timur” (Rusia).


Kultus keagungan masa lalu Rusia sebagai kerajaan besar mengilhami Putin untuk memperluas pengaruhnya ke Ukraina. Pencaplokan Krimea tahun 2014 serta Donetsk dan Luhansk yang diakui merdeka oleh Rusia pada awal tahun 2022 mengakibatkan hilangnya dua wilayah Ukraina bagian timur. Hal tersebut membuktikan ambisi Putin untuk mengendalikan Ukraina. Sehingga, banyak yang pihak yang berpendapat bahwa Ukraina belum memiliki situasi demokratis, termasuk dalam permasalahan di bidang kesejahteraan dan kemakmuran.

Invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina yang ada saat ini dipandang kuat merupakan dampak dari tindakan Ukraina yang ingin menjadi bagian *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Tindakan Rusia tersebut dijustifikasi sebagai bentuk menjaga pertahanan negaranya dari ancaman yang ada bila Ukraina menjadi bagian dari NATO. Selain itu, Rusia melakukan invasi juga sebagai upaya melakukan penguatan secara politik di Ukraina sehingga nantinya bisa membangun kembali Uni Soviet. Rangkaian pembangkitan Uni Soviet tersebut dilakukan melalui demokratisasi, demiliterisasi, dan penguatan penggunaan Bahasa Rusia di Kremlin.

Berdasarkan narasi kebudayaan dan sejarah panjang kedua negara yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa penyebab perang antara Rusia dan Ukraina bukan karena persamaan kebudayaan, tetapi gagasan pemikiran dan politik termasuk nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang membuat kedua negara tersebut tidak terintegrasi.



“Meski memiliki kedekatan budaya, hal itu tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran (adanya konflik bersenjata). Bila dilihat justru yang menjadi pemicu konflik (di antara Rusia dan Ukraina) ialah nilai-nilai, partisipasi politik, prinsip demokrasi, dan lainnya. Keduanya satu rumpun budaya, tetapi gagasan politik dan pemikiranlah yang menjadikan Rusia dan Ukraina tidak dapat terintegrasi. Ini dia menurut saya yang menjadi kunci sebab kedua negara tersebut tidak dapat bersatu, bukanlah kebudayaan.” tutup Marten.

Penulis: 

Naufal Aziz & Dina Oktaviani



An aerial night photograph of a city, likely Kyiv, showing a large fire burning in the center of the city. The fire is bright orange and yellow, contrasting sharply with the dark night sky and the silhouettes of buildings. The city lights are visible in the background, creating a somber and dramatic atmosphere.

PEDANG KEADILAN DI MEDAN PERANG: MENILIK HUKUM HUMANITER PADA PERANG DI UKRAINA

Rusia dan Ukraina memiliki sejarah konflik yang panjang semenjak kedua negara tersebut berpisah dari naungan Uni Soviet yang kemudian meruncing pada tahun 2014. Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovich, berencana untuk melakukan kesepakatan Asosiasi Perjanjian dengan Uni Eropa. Namun, secara mendadak Presiden Viktor Yanukovich justru melakukan kesepakatan dengan pihak Rusia yang memicu aksi protes dari berbagai kalangan masyarakat khususnya masyarakat dari daerah perbatasan. Gelombang protes tersebut berimplikasi pada digulingkannya Presiden Viktor Yanukovich dalam jabatannya sebagai Presiden Ukraina dan digantikan oleh Petro Poroshenko. Rusia berhasil melakukan aneksasi Semenanjung Krimea dengan melakukan mekanisme penyelenggaraan referendum. Salah satu faktor keberhasilan Rusia dalam melakukan aneksasi Krimea adalah karena mayoritas penduduk Krimea adalah golongan pro Rusia.

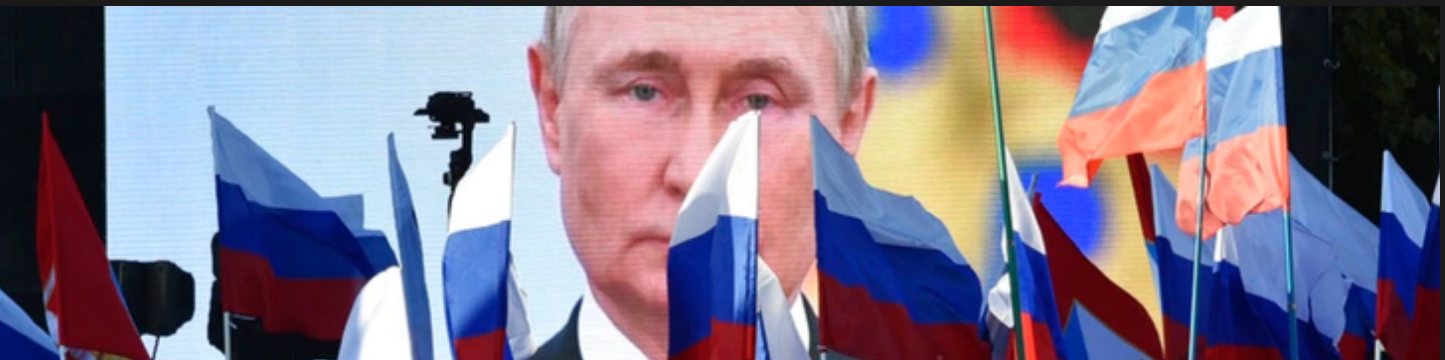
Para pemimpin dari Belarusia, Rusia, Jerman, Prancis, dan Ukraina pada pertemuan puncak 11-12 Februari di Minsk
https://id.wikipedia.org/wiki/Minsk_II



Setelah terjadinya aneksasi tersebut, hubungan pemerintah Ukraina dengan Rusia semakin memanas. Maka, muncul upaya untuk mencari jalan tengah dengan dilakukannya Perjanjian Minsk di Belarus dalam jangka waktu perjanjian pada 2014-2015. Dalam perjanjian ini disepakati beberapa pokok perhatian antara kedua negara, terkhusus bagi wilayah Luhansk dan Donetsk, antara lain ialah poin berkaitan dengan manajemen konflik aktual di wilayah penduduk, rencana pengintegrasian antar wilayah ke Ukraina, pembahasan politik dan status khusus, dan tata cara penyusunan pemilu. Namun, dalam keberjalanan perjanjian tersebut kembali menemui permasalahan yaitu tidak samanya interpretasi masing-masing negara terhadap makna perjanjian tersebut. Rusia mengartikan bahwa Perjanjian Minsk merupakan perjanjian yang memfasilitasi status khusus bagi Donetsk dan Luhansk. Di pihak lain, Ukraina menilai bahwa perjanjian ini menyatakan bahwa Donetsk dan Luhansk benar-benar merupakan bagian wilayah dari Ukraina.

Konflik antara Ukraina dan Rusia dipicu pula dari keinginan Ukraina untuk bergabung dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang membuat hubungan Ukraina dengan Rusia semakin tegang. Pemerintah Rusia menganggap bahwa rencana Ukraina untuk bergabung dengan NATO akan mengancam keamanan dan pertahanan Rusia dengan memindahkan kekuasaan NATO ke Eropa Timur. Pada 21 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk yang disampaikan melalui siaran televisi Rusia. Hal ini menimbulkan beragam komentar dari masyarakat Internasional.

Tentunya, konflik yang terjadi di Eropa Timur ini membawa persoalan khusus di bidang hukum humaniter. Sebagai satu-satunya acuan hukum yang berlaku saat perang, ia akan memberikan jawaban tentang legalitas segala peristiwa yang terjadi di sana.



<https://www.voaindonesia.com/artusi-a-umumkan-aneksasi-wilayah-ukraina-6771365.html>

APAKAH ANEKSASI KRIMEA TAHUN 2014 DAPAT DIANGGAP SAH OLEH HUKUM INTERNASIONAL?

Aneksasi adalah pengakuan sepihak dari suatu (entitas) atau kekuasaan terhadap suatu wilayah, yang kemudian mendapat dukungan atas pengakuan tersebut baik dari entitas wilayah maupun entitas lain. Aneksasi yang terjadi di Krimea pada tahun 2014 merupakan salah satu bentuk aneksasi yang dilakukan dengan cara damai melalui perjanjian, meskipun di dalam proses aneksasi tersebut terdapat konflik baik sebelum, saat, dan setelah perjanjian tersebut disepakati.

Beberapa negara menentang upaya aneksasi yang dilakukan oleh Rusia tersebut, gelombang protes muncul dari banyak pemimpin dunia yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Rusia adalah upaya pencaplokan secara ilegal wilayah negara Ukraina. Rusia juga dianggap telah melakukan serangkaian intervensi yang dilakukan dalam wilayah Krimea untuk mendukung rencana aneksasi tersebut.

Negara-negara G-7 menyatakan bahwa Rusia telah melanggar beberapa peraturan Internasional seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Final Act of Helsinki Conference*, *Council of Europe*, dan aturan konstitusi Ukraina. Hal ini mengakibatkan adanya kebijakan untuk menunda keanggotaan Rusia dalam kelompok G-7. Referendum yang dilakukan di Krimea dianggap berlangsung dengan penuh Intervensi. Hal ini disebabkan rencana referendum yang dijadwalkan secara mendadak dan dilakukan di bawah pengawasan militer Rusia yang tersebar di wilayah Krimea. Dalam hal ini, serangkaian alasan pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia menjadi alasan bagi negara lain khususnya G-7 untuk memberikan sanksi kepada negara Rusia.

BAGAIMANA KEABSAHAN INVASI UKRAINA YANG DILAKUKAN OLEH RUSIA SEMENJAK FEBRUARI 2022?

Pada tanggal 24 Februari 2022, Pemerintah Rusia melalui Presiden Vladimir Putin menyatakan status kemerdekaan dua daerah Ukraina yaitu Donetsk dan Luhansk. Invasi yang dilakukan oleh Rusia pada Ukraina merupakan peristiwa yang sangat jarang terjadi di mana suatu negara merdeka melakukan invasi pada negara merdeka lainnya. Karena itu, kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Putin dan pemerintahan Rusia menimbulkan kecaman dari seluruh dunia.



<https://sumbatimur.victorynews.id/dunia/pr-3433887967/korea-utara-jadi-negara-ketiga-yang-akui-kemerdekaan-donetsk-dan-luhansk>

Invasi yang dilakukan Rusia jika ditarik dalam kerangka hukum internasional telah melanggar berbagai hukum internasional, salah satunya adalah Piagam PBB. PBB tidak memperbolehkan adanya invasi tanpa ada alasan yang jelas. Pasal 2 Ayat 1 Piagam PBB (*United Nations Charter*) menyebutkan “*All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the united nations*”. Dengan kata lain, setiap negara dalam naungan PBB harus menahan diri dalam hubungan internasional agar tidak melakukan kekerasan yang ditujukan kepada negara lain atau entitas lain sebagai bentuk upaya non intervensi dan menjaga kedaulatan negara lain. Apa yang telah dilakukan Rusia tentu melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh PBB.



<https://www.dreamstime.com/irpin-ukraine-mar-war-thousands-residents-have-to-abandon-their-homes-evacuate-as-russian-troops-bombing-peaceful-image243026660#res33626426>

APAKAH PIHAK RUSIA MELAKUKAN KEJAHATAN PERANG, MELIHAT GAMBAR-GAMBAR YANG DIBERITAKAN DI MEDIA (KHUSUSNYA YANG TERJADI DI BUCHA)?

Kejahatan perang dikenal sebagai *the Most Serious Crimes*. Definisi kejahatan perang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 yang dalam perkembangannya lebih jelas lagi tertulis dalam Pasal 8 Statuta Roma 1998, yang merumuskan bahwa Kejahatan Perang merupakan Pembunuhan yang disengaja; Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi termasuk percobaan biologis; Dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar, atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan; Penghancuran yang luas dan perampasan properti, tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan semena-mena; Memaksa seorang tawanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk mengabdikan dalam kekuatan Negara yang bermusuhan; Dengan sengaja merampas hak tawanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk adil dan teratur uji coba; Deportasi atau pemindahan yang tidak sah atau pengurangan yang tidak sah; Penyanderaan; dan Pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam pertikaian bersenjata.

Berdasarkan penjelasan terkait kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998, invasi Rusia terhadap Ukraina termasuk dalam kejahatan perang. Apa yang dilakukan Rusia memberikan dampak kerugian dan kerusakan yang sangat besar seperti hilangnya ribuan nyawa hingga kerusakan besar pada infrastruktur di Ukraina khususnya yang terjadi di Bucha dilihat dari kompilasi gambar mengenai kondisi Ukraina yang tersebar di berbagai media.

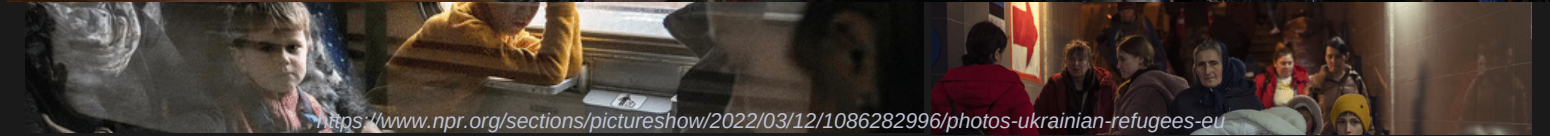
Hasil Investigasi oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen (*Independent International Commission of Inquiry on Ukraine*) yang dibentuk oleh PBB via laman resminya pada 18 Oktober 2022 juga menyatakan bahwa Rusia bertanggung jawab atas sebagian besar tindakannya yang teridentifikasi sebagai kejahatan perang. Namun, dalam laporan hasil investigasi ini, Ukraina juga dinilai melakukan kejahatan dengan tingkat yang berbeda dengan Rusia. Ukraina melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional, dimana terdapat dua insiden yang memenuhi syarat kejahatan perang.



<https://www.tribun6.com/global/read/4997161/penyelidikan-ungkap-kemungkinan-bukti-kejahatan-perang-rusia-di-ukraina>



<https://www.npr.org/sections/pictureshow/2022/03/12/1086282996/photos-ukrainian-refugees-eu>



<https://www.npr.org/sections/pictureshow/2022/03/12/1086282996/photos-ukrainian-refugees-eu>



<https://www.npr.org/sections/pictureshow/2022/03/12/1086282996/photos-ukrainian-refugees-eu>

Dalam dokumentasi Komisi Penyelidikan Internasional Independen, Rusia melakukan serangan tanpa pandang bulu menggunakan amunisi-amunisi tandon, roket terarah, dan serangan udara dalam konteks upaya angkatan bersenjata Rusia untuk menawan kota-kota dan pemukiman yang lebih kecil. Selanjutnya, Komisi mendokumentasikan pola eksekusi singkat, kurungan yang melanggar hukum, penyiksaan, perlakuan buruk, pemerkosaan, dan kekerasan seksual lainnya yang dilakukan di daerah-daerah yang diduduki oleh angkatan bersenjata Rusia di empat provinsi. Masyarakat sipil ditahan, bahkan beberapa telah dideportasi secara tidak sah ke Rusia, serta banyak yang masih dilaporkan hilang. Kekerasan seksual berdampak terhadap korban dari segala usia. Korban, termasuk anak-anak, terkadang dipaksa untuk menyaksikan kejahatan.

Penjelasan dokumentasi yang dilakukan oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen sesuai seperti pada gambar-gambar yang tersebar di media. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa memang Rusia telah melakukan kejahatan perang terhadap Ukraina khususnya pada wilayah Bucha, sebagai suatu bentuk menyebabkan penderitaan besar atau cedera serius (di antara yang lain), sesuai dengan kriteria di atas.



<https://apnews.com/article/russia-ukraine-vladimir-putin-volodymyr-zelenskyy-kyiv-business-246eb3174b758602e09549f7fa348413>



Penulis:



Atmakeno Daniswara, Putri Rahmanda, Vischa Aurora

KATA MAHASISWA DI BALIK RUSIA-UKRAINA

Konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memanas dengan dimulainya Rusia yang melancarkan segala bentuk serangan ke Ukraina terhitung sejak Kamis (24/2/2022). Namun, di balik konflik tersebut hubungan Ukraina dan Rusia sebagai negara maupun suku bangsa memiliki akar sejarah panjang yang kadang diwarnai konflik. Dua negara ini berasal dari kerajaan Kievan Rus yang mana wilayah tersebut membentang di bagian-bagian yang kini disebut sebagai, Rusia, Ukraina, dan Belarusia pada abad ke-9 hingga abad ke-13.

Perjalanan panjang sejarah di antara kedua negara tersebut menjadikan wilayah Ukraina terseret ke pusaran Perang Dunia II (1939-1945) yang berakhir di Perang Dingin (1947-1991). Perang tersebut terbagi menjadi dua kubu besar antara negara, yakni Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, negara suksesor Rusia.

Ukraina pun mendeklarasikan kemerdekaannya menjadi negara berdaulat dan resmi diakui secara *de jure* oleh komunitas Internasional setelah Uni Soviet resmi membubarkan diri pada 26 Desember 1991 yang tidak terlepas dari keruntuhan Uni Soviet akibat perang.



Ilustrasi Oleh: Vanya Jasmine & Aqila Salsabilla

Ketegangan antara Rusia dan Ukraina pun sempat memanas di tahun 2014 ketika kelompok separatis yang didukung oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, merebut sebagian besar wilayah timur Ukraina dengan menganeksasi Krimea. Hingga akhirnya ketegangan tersebut memuncak ketika Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych, digulingkan pada awal 2014 akibat disinyalir pro-Rusia. Kurang lebih 14.000 nyawa melayang dalam peristiwa tersebut. Banyaknya nyawa yang hilang menjadikan Rusia dan Ukraina menandatangani Perjanjian Damai Minsk untuk menghentikan konflik bersenjata di Ukraina bagian Timur.

Perseteruan antara Rusia dan Ukraina kali ini tidak dapat dibendung lagi karena Rusia akhirnya mulai menyerang Ukraina. Presiden Vladimir Putin telah mengumumkan operasi militer secara resmi yang bertujuan untuk melakukan demiliterisasi Ukraina. Operasi tersebut dilancarkan melalui serangan ke sejumlah kota-kota besar Ukraina seperti Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan Kiev sebagai ibukota yang diserang dengan ledakan. Serangan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan dikarenakan Ukraina sebagai negara bekas Uni Soviet alias Rusia diyakini lebih mendekatkan diri ke barat dan hendak menjadi bagian *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang ditandai dengan berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasan negaranya.

Kendati demikian, Rusia telah memulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022 dengan kerja sama dengan Belarusia sebagai sekutu sekaligus tetangganya. Latihan tersebut mengerahkan seluruh angkatan laut dan darat. Awalnya Rusia membantah akan menyerang saat itu. Presiden Vladimir Putin memulai langkahnya dengan mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada negara barat untuk meminta NATO menghentikan segala aktivitas militer di Eropa Timur, khususnya Ukraina. Rusia juga meminta aliansi NATO untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara bekas Soviet lainnya sebagai bagian dari NATO yang dikhawatirkan akan memunculkan kecemasan Rusia akan keamanan negaranya.





Pada kesempatan kali ini, kami mewawancarai tiga mahasiswa pengamat aktif perkembangan konflik Rusia-Ukraina dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai narasumber untuk mengetahui pandangan mereka. Narasumber tersebut antara lain adalah Muhammad Alfatah Birza dari Universitas Islam Indonesia, Nanda Aulia dari Universitas Katolik Parahyangan, dan Willa Marbun dari Universitas Sumatera Utara. Menurut ketiga narasumber, konflik antara Rusia dan Ukraina bukanlah suatu hal yang baru, melainkan sudah berjalan sejak lama dan diperparah di tahun ini ketika munculnya keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Hal tersebut membuat Rusia khawatir karena akan mengancam kedaulatan Rusia serta ketakutan akan misi pertahanan di perbatasan Rusia.



Muhammad Alfatah Birza mengemukakan bahwa buah ketegangan politik pada saat ini merupakan hasil pekerjaan Rusia atas prosesi negara-negara barat selama puluhan tahun ke belakang. Pada awal tahun 1990-an, diketahui terdapat sebuah perjanjian lisan antara pemimpin-pemimpin Eropa yang mana meminta Uni Soviet untuk mengurangi pengembangan militer dan senjata nuklirnya, sebagai gantinya negara-negara barat berjanji akan membantu Uni Soviet secara ekonomi dan memberikan garansi untuk tidak memperluas wilayah NATO melebihi batas Jerman yang saat itu baru saja kembali bersatu. Namun, tidak adanya dokumen tertulis untuk menjadi rujukan dasar hukum dari perjanjian ini menjadikannya tidak diakui, sehingga tidak heran jika negara-negara Eropa Timur seperti mantan anggota Pakta Warsawa bergabung ke NATO di awal abad-21, seperti Polandia, Hungaria, Slovakia, Slovenia, Rumania, Bulgaria, Lituania, Latvia, dan Estonia. Pasukan militer NATO pun bergerak semakin ke timur menuju perbatasan Rusia dan mulai mengancam keamanan wilayahnya. Sehingga dengan kondisi Rusia yang terhimpit ini menjadikan Rusia mulai meminta jaminan dari perjanjian yang sebelumnya telah diucapkan tersebut.



2

3

Berikutnya, Alfatah juga menjelaskan bahwa adanya kabar Ukraina yang identik dengan kebangkitan Neo Nazi dengan anggapan bahwa Ukraina adalah negara yang dikaitkan dengan Nazisme yang telah menjadi fitur reguler di media-media Rusia hanya mengada-ada dan sekadar isu belaka, sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Willa Marbun. Di lain sisi, menurut Alfatah dan Willa, serangan Rusia terhadap Ukraina malah memiliki persamaan terhadap pertikaian antara China dan Taiwan. Peralnya, Ukraina sendiri merupakan pecahan dari Uni Soviet begitu pula dengan China dan Taiwan.

Nanda Aulia turut menerangkan mengenai ketidak inginan Rusia terhadap Ukraina untuk memutuskan nasibnya sendiri sebagai negara merdeka termasuk keinginan bergabung dengan NATO karena Rusia dengan NATO telah melakukan suatu perjanjian yang mana NATO tidak boleh memperluas aliansinya di negara timur. Sependapat dengan Alfatah dan Willa, Nanda menjelaskan bahwa Ukraina merupakan benteng pertahanan dari Rusia yang mana letak geografis dari Ukraina berbatasan dengan negara-negara Barat sehingga apabila Ukraina bergabung dengan NATO akan membuat keberadaan Rusia terancam sebab Ukraina akan menjadi barisan terdepan NATO untuk menyerang Rusia.





<https://www.eupoliticalreport.eu/tension-of-the-kremlins-red-lines/>



<https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/03/2022/indonesia-harus-siap-hadapi-risiko-terburuk-dari-rusia-vs-ukraina/?amp>



<https://besacenter.org/russia-pressures-ukraine-to-little-avail/>

Ketiga mahasiswa itu pun mengakhiri pernyataannya bahwa Indonesia telah konsisten dengan prinsip bebas aktif dalam menyikapi krisis yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Dalam hal ini, bebas aktif bukan berarti netral, tetapi juga memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun penyelesaian konflik. Prinsip bebas aktif ini tidak identik dengan sikap netral melainkan bebas bersikap sesuai dengan kepentingan nasional. Nanda menambahkan, bahwa atas invasi Rusia tersebut menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang memberikan vote abstain dalam konflik ini sebagai bentuk kehati-hatian.



Penulis:

Ria Rindika & Ester Palmina Marbun





NASIONALISASI PERUSAHAAN MILIK ASING DAN IMPLIKASI TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KONFLIK RUSIA - UKRAINA

Awal tahun 2022 ini, dunia khususnya negara-negara Eropa Timur dikejutkan dengan meletusnya operasi militer antara Rusia dengan Ukraina. Seperti yang kita ketahui, Rusia dan Ukraina merupakan dua negara serumpun yang secara geopolitik, kebudayaan, dan sejarah memiliki kedekatan serta keterkaitan. Berawal dari kedekatan Ukraina dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang memicu perselisihan dan konflik dengan Rusia, pada akhirnya perang di antara keduanya tidak bisa terhindarkan.

Adanya perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mempengaruhi banyak aspek bagi masyarakat internasional, salah satunya adalah aspek ekonomi dan perdagangan. Banyak implikasi yang terjadi akibat konflik tersebut, di antaranya adalah naiknya harga minyak bumi, gas bumi, dan gandum. Tidak hanya itu, perang Rusia-Ukraina juga membawa dampak yang sangat signifikan terhadap Rusia. Hal ini dapat dilihat dari diberikannya sanksi ekonomi kepada Rusia oleh Amerika Serikat juga sekutunya yaitu NATO dan Uni Eropa, yang mana tindakan tersebut dilakukan untuk memberi tekanan politik terhadap Rusia.

Akan tetapi, langkah yang diambil oleh Amerika Serikat dan sekutunya tersebut tidak membuat Rusia takut. Malah dengan adanya kebijakan tersebut membuat Rusia mengambil tindakan balasan yaitu dengan menasionalisasi aset-aset perusahaan asing yang berasal dari negara-negara tidak bersahabat. Kebijakan tersebut kemudian diwujudkan dengan dibentuknya rancangan undang-undang untuk menasionalisasi perusahaan asing yang berasal dari negara-negara tidak bersahabat oleh lembaga legislatif Rusia. Tindakan balasan ini tentunya mengundang protes dari negara-negara yang berinvestasi di Rusia karena dengan nasionalisasi aset perusahaan asing akan merugikan negara-negara investor.

Sebagaimana yang kita ketahui, hukum internasional tidak mengatur secara tegas tentang legalitas nasionalisasi perusahaan asing oleh suatu negara. Namun, menurut Prof. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum., salah satu ahli hukum internasional di Indonesia yang kini bertugas sebagai dosen Hukum Internasional Universitas Diponegoro, adanya rencana nasionalisasi aset yang dilakukan Rusia bagi perusahaan-perusahaan asing serta negara-negara yang tidak bersahabat dengan Rusia merupakan salah satu hak yang dapat dilakukan oleh Rusia.

Merujuk pada pengertiannya, nasionalisasi merupakan suatu proses pengambilalihan harta milik asing yang ada di suatu negara di negara. Tindakan nasionalisasi perusahaan asing sebenarnya juga pernah dilakukan sebelumnya, termasuk oleh Indonesia pada tahun 1958. Saat itu, Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset Belanda yang pada saat itu berada di wilayah Indonesia untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Kasus ini kemudian dibawa ke Arbitrase di Jerman untuk diadili. Adapun hasil putusan yang dihasilkan oleh Arbitrase Jerman cukup menarik, dengan hasil putusan yaitu nasionalisasi yang dilakukan oleh Indonesia tersebut dibenarkan. Akan tetapi, Arbitrase Jerman tidak membenarkan kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak yang dinasionalisasi yaitu Pemerintah Belanda, karena kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan asas-asasnya. Selain Indonesia, kasus yang serupa juga terjadi di negara-negara di Amerika Selatan, yang mana negara-negara di Amerika Selatan juga melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan milik asing. Akan tetapi, tindakan nasionalisasi tersebut berakibat pada kepercayaan investor asing terhadap negara-negara di Amerika Selatan, sehingga negara asing di luar Amerika Selatan menjadi ragu untuk berinvestasi di negara yang bersangkutan.

Tindakan Rusia yang melakukan nasionalisasi sebagai tindakan balasan atas tindakan Amerika dan sekutunya merupakan hal yang bisa saja terjadi di masa sekarang. Namun, suatu negara harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi ketika melakukan nasionalisasi aset perusahaan milik asing. “Sekalipun nasionalisasi bisa dilakukan, tetapi secara ekonomi sebenarnya merugikan,” jelas Prof. Adji Samekto yang kini juga menjabat sebagai Deputy Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPPI).



“

“Walaupun perang Rusia dan Ukraina adalah sesuatu hal yang tidak bisa menjadi semacam patron, artinya polanya agak luar biasa, secara politik tindakan menasionalisasi aset perusahaan asing akan sangat merugikan Rusia. Akan tetapi, sepertinya dalam hal ini Rusia sudah memiliki perhitungan dan mengetahui resiko dari tindakannya.”

”



Meskipun Rusia merupakan negara adidaya dan memiliki posisi penting dalam sistem politik dan perekonomian dunia, Prof. Adji Samekto menjelaskan bahwa kepercayaan investor terhadap Rusia akan terdampak jika Rusia tetap ingin melakukan nasionalisasi. Sekalipun nasionalisasi aset perusahaan asing tersebut dilakukan terhadap negara-negara yang dianggap tidak bersahabat oleh Rusia, hilangnya kepercayaan investor asing terhadap Rusia akan sangat berpengaruh pada perekonomian negara tersebut. Apabila banyak investor asing memutuskan untuk hengkang dari Rusia, maka Rusia akan sangat dirugikan karena investasi asing merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi terbesarnya. Meskipun demikian, nasionalisasi aset perusahaan asing dari negara tidak bersahabat oleh Rusia ini hanya berdampak pada Rusia dan negara investor. Oleh karena itu, tindakan balasan Rusia ini tidak akan berdampak pada perdagangan internasional secara keseluruhan. Hal ini karena sistem perdagangan dunia telah memiliki ketentuannya sendiri sehingga tidak terdampak dari tindakan yang diambil oleh Rusia.



Jadi, apakah tindakan dari Rusia tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kembali lagi ke sudut pandang atau perspektif setiap orang dalam memandang sengketa tersebut. Dikarenakan Rusia memang menderita atas tekanan dari Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa, dalam hal ini bisa saja kita memahami bahwa tindakan dari Rusia tersebut merupakan tindakan dalam rangka untuk menyelamatkan dan mempertahankan kedaulatan negaranya. Sehingga dalam hal ini, dari sudut pandang hukum internasional, tindakan Rusia tidak bertentangan dengan hukum internasional, serta adanya tindakan nasionalisasi Rusia tersebut tidak akan berdampak pada sistem perdagangan dunia. Akan tetapi, nasionalisasi tersebut harus disertai dengan ganti rugi yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum internasional. Apabila timbul sengketa atas hal tersebut, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitrase maupun pilihan forum lainnya yang telah disepakati.



Penulis:

Vanessa Kristina & Rose Nababan



Korban Perang Rusia - Ukraina

5.663 orang
tewas

8.055 orang
luka-luka

Korban Warga Sipil Ukraina
(berdasarkan laporan dari Kantor
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak
Asasi Manusia (OHCHR) sampai
28 Agustus 2022).

70.000
hingga
80.00 orang

**Korban yang terbunuh dan terluka
di Rusia** sejak invasi dimulai pada
Februari lalu hingga 23 Agustus
2022 menurut Colin Kahl, Wakil
Menteri Pertahanan untuk
Kebijakan Pentagon.

Kerugian yang dialami Ukraina

Kehilangan 20%
wilayah

Rugi sebanyak
USD 113.5 miliar
atau setara
dengan Rp1682
Triliun

Seorang wartawan The Fox News
bernama **Benjamin Hall** yang berasal
dari Amerika Serikat, mengalami
luka saat tengah bertugas di dekat
Kyiv, Ukraina pada Selasa (15/3).

Brent Renaud, seorang pembuat
film yang berasal dari Amerika
Serikat, terbunuh saat terjadi
kontak senjata antara tentara
Ukraina dengan Rusia (12/3).

Fotografer asal Amerika Serikat,
Juan Arredondo, ditembak di
leher sehingga meninggal
dunia.

Kepala Koresponden Sky News, **Stuart
Ramsay**, tertembak di punggung
bersama operator kamera, **Richie
Mockler**, yang tertembak dua kali di
sekitar dada oleh tentara Rusia.

ALEKSANDR DUGIN: SIAPAKAH SOSOK YANG DISEBUT SEBAGAI OTAK PUTIN ?



Vladimir Putin sering dipersalahkan sebagai “sumber perkara” invasi Ukraina oleh Rusia. Ia sebagai Presiden Rusia, memang menjadi kepala dari segala kebijakan yang dilakukan oleh Rusia, termasuk keputusan untuk menganeksasi Krimea, membantu gerakan separatisme di Timur Ukraina, serta akhirnya menyerang Ukraina secara penuh, memulai perang secara masif, terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II.



Namun, ada sosok yang disebut berbagai media sebagai “otak” dari Putin. Sosok ini menjadi dasar ideologis dari penyerangan yang dilakukan oleh Putin, memberikan si mantan agen KGB justifikasi filsafati atas segala keputusannya. Sosok ini tak lain adalah Aleksandr Dugin.

Lalu, siapakah Aleksandr Dugin? Bagaimana ia dapat sampai disebut sebagai *dalang dari dalang perang*? Apa ide-ide darinya yang mempengaruhi hal tersebut? Apakah *benar* ia memang mempengaruhi Putin?

BUKU YANG DITULIS

Aleksandr Dugin merupakan seorang yang gemar menulis bahkan pernah menjadi penulis dan penerbit dalam riwayat karirnya. Berikut ini beberapa buku yang ditulis oleh Aleksandr Dugin yaitu *Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia, Eurasian Mission, Against Liberal Postmodernity, Fourth Political Theory, A Russian Version of the European Radical Right?, dan Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism*.

PARTAI POLITIK

Aleksandr Dugin adalah penyelenggara dan pemimpin pertama Partai Bolshevik Nasional dari 1993 hingga 1998 dan Partai Eurasia, yang filosofinya menggabungkan Neopaganisme, Nativisme Slavia, Gnostisisme, Hermetisisme, dan tradisi Ortodoks Timur, serta menggunakan tradisi mistik tertentu untuk pengembangan Dugin "*Fourth Political Theory*". Dalam Partai Eurasia (sebuah cabang ultranasionalis dari Bolshevik Nasional), anggota partainya sangat konservatif secara sosial dengan pandangan ekonomi fasis yang mana anggotanya secara sukarela membantu Separatis Rusia di Ukraina timur.

PEKERJAAN ALEKSANDR DUGIN

Sebelum ia berkarir di bidang politik, Aleksandr Dugin memulai karir sebagai penulis, dengan topik yang mencakup berbagai bidang dari filsafat, politik, Rusia dalam beberapa aspek (termasuk Uni Soviet), geopolitik, sejarah agama, Eurasia, sosiologi, hingga tradisionalisme; karya-karya ini juga bervariasi dalam format (esai, buku teks, program teks, buku). Karya-karyanya mulai diterjemahkan dalam banyak bahasa pada tahun 1997.

Selain berkarir di pasar penerbitan, setelah menciptakan banyak jurnal dalam tiga puluh tahun terakhir seperti *Den' (Day)*, *Pamjat (Memory)*, *Elementy (Elements)*, *Zavtra (Tomorrow)*, Dugin pernah menjabat sebagai penasihat juru bicara Duma Negara, Gennadiy Seleznyov. Ia pun mendirikan CEM - Pusat Studi Multipolaritas Rusia-Brasil, di Brasil, bersama dengan filsuf Brasil, Flavia Virginia.

Aleksandr Dugin juga pernah memegang dua posisi dari 2008 hingga 2014 di Fakultas Sosiologi Universitas Negeri Moskow selaku kepala Departemen Hubungan Internasional dan kepala Pusat Studi Konservatif. Pada tahun 2014, ia diberhentikan dengan alasan politis.

IDEOLOGI

Dikutip dari *defenceconnect.com*, Aleksandr Dugin adalah seorang filsuf politik, membangun ideologi politik yang menghidupkan kembali kebijakan luar negeri Rusia yang ekspansionis dan luar biasa setelah upaya liberalisasi Boris Yeltsin yang gagal sepanjang tahun 1990-an. Namun, kebijakan anti-Barat yang ganas telah meresap ke inti Kremlin. Ideologi tersebut dijuluki Neo-Eurasianisme, filosofi tersebut menyerukan kembalinya multipolaritas di mana negara-negara besar, di mana Rusia adalah salah satunya, masing-masing memiliki lisensi untuk mendominasi wilayah langsung mereka tanpa campur tangan dari kekuatan asing.



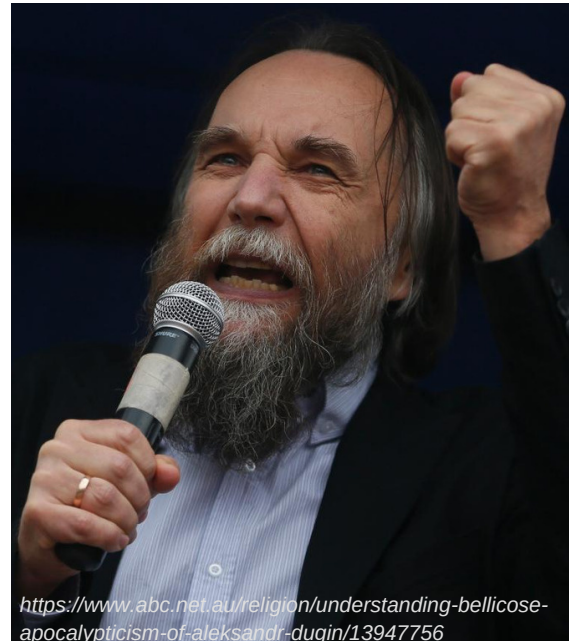
NATIONAL BOLSHEVIK

Partai National Bolshevik merupakan gambaran yang menunjukkan relasi Jerman-Rusia setelah perang dunia pertama. Pada awalnya merupakan hal yang sangat membingungkan untuk menyatukan atau membuat relasi antara dua negara yang memiliki pandangan politik yang berbeda, tetapi ditemukanlah titik tengah antara Jerman dan Rusia dengan mengambil paham nasionalis dari Jerman dan paham komunis dari Rusia yang menjadi cikal bakal dari National Bolshevik.

Dalam sebuah jurnal mengenai Partai National Bolshevik, Aleksandr Dugin sendiri merupakan pendiri dari *The National Bolshevik Party* (NBP) pada tahun 1993, yang ditemani oleh kawannya Eduard Limonov juga kawan-kawan seperjuangan yang lainnya. Dia merupakan chief ideologus NBP yang mana ia membawa pemahaman neo-imperialistik dan juga pendukung dari gagasan revolusi konservatif. Namun pada tahun 1998, Dugin bersama para pengikutnya keluar dari NBP yang membuat Eduard Limonov sebagai pemimpin partai menuduh Dugin sebagai fasis dan berpindah haluan politik ke sayap kiri Rusia.

NEO-EURASIANISME

Neo-Eurasianisme merupakan doktrin yang dibuat oleh Aleksandr Dugin yang berakar dari filosofi politik-budaya kanan baru di eropa. Neo-Eurasianisme didasarkan pada teori kuasi-geopolitik yang menyandingkan 'Tata Dunia Baru Atlantis' (terutama AS dan Inggris) melawan 'Orde Eurasia Baru' yang berorientasi Rusia. Dugin berpendapat bahwa tatanan dunia baru tersebut merupakan kekuatan yang melemahkan keragaman nasional dan budaya yang merupakan nilai inti dari Eurasia.



<https://www.abc.net.au/religion/understanding-bellicose-apocalypticism-of-aleksandr-dugin/13947756>



<https://ricochet.com/292512/putins-propaganda-dugans-lunacy-and-you/>

Neo-Eurasianisme, yang disakralkan oleh Dugin dan pengikutnya dalam bentuk agama politik, memberikan terobosan yang jelas dari nasionalisme sempit menuju model eto pluralis Kanan Baru. Filosofi Neo-Eurasianisme mendapat tanggapan luar biasa di antara para politisi Rusia, filsuf, sejumlah mahasiswa, serta banyak seniman dan musisi. Pada akhir 1990-an, Neo-Eurasianisme mengambil kedok akademis yang terhormat dan ditarik untuk 'secara ilmiah' mendukung beberapa anti-Amerika dan anti-Inggris dari pemerintah Rusia.

FOURTH POLITICAL THEORY

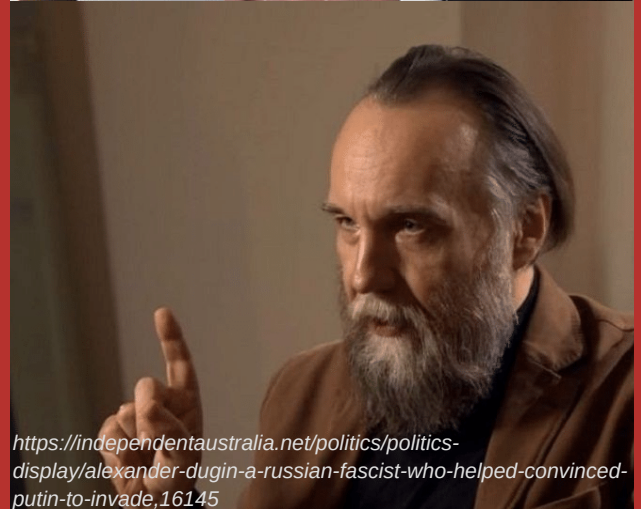
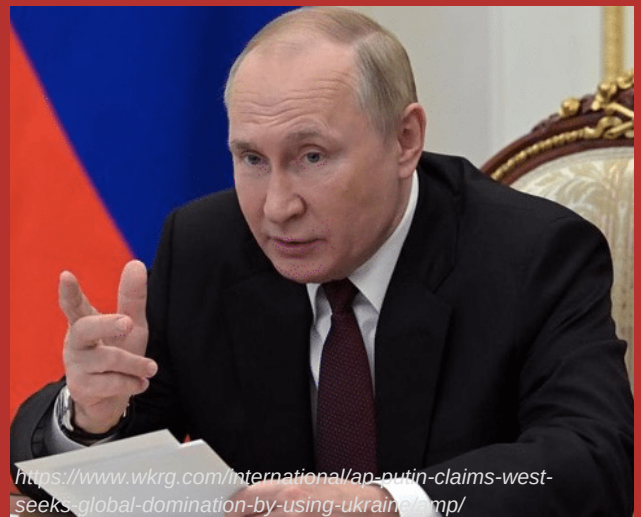
Menurut jurnal Israel Shamir yang meninjau mengenai buku *The Fourth Political Theory* oleh Aleksandr Dugin, dapat dipahami bahwa ia meneliti setiap konsep dan ideologi dari barat maupun timur bahkan yang sudah dilanggar dan dilupakan. Dugin bahkan meneliti ideologi komunis yang termasuk dalam ide-ide radikal seperti yang dimiliki oleh Adolf Hitler dan Benito Mussolini. Dugin telah membuat suatu ideologi baru yakni *The Fourth Political Theory*. Ideologi ini bertentangan dengan tiga paradigma politik yang sangat dominan selama satu abad ini yakni liberalisme, komunisme dan fasisme. Teori ini tidak hanya menjelaskan mengenai dunia yang kita jalani saat ini, melainkan mengubahnya dengan kata lain memberikan perlawanan terhadap liberalisme yang ada di barat. *The Fourth Political Theory* ini mengambil serta menggabungkan hal-hal yang dianggap sukses dan menolak kerusakan-kerusakan yang ada dalam ketiga ideologi tersebut. Dalam ideologi komunisme, Dugin mengambil prinsip materialisme dan keyakinan akan kemajuan ekonomi namun menolak anti-etnik dan anti-spiritualisme harus ditolak. Dugin juga mempertimbangkan beberapa aspek positif dari fasisme yang membuatnya dicap sebagai seorang “Nazi” padahal ia bukanlah seseorang yang rasis. Akan tetapi, penolakannya terhadap liberalisme tetap dipertahankan.

HUBUNGAN DENGAN VLADIMIR PUTIN

Pada dasarnya menurut beberapa media Aleksandr Dugin merupakan dalang atau otak dari Vladimir Putin yang membuatnya menginvasi Ukraina, padahal keduanya belum pernah bertemu sama sekali. Banyak media yang membuat berita-berita hoaks atau mengedit foto mereka masing-masing dan menyatukannya.

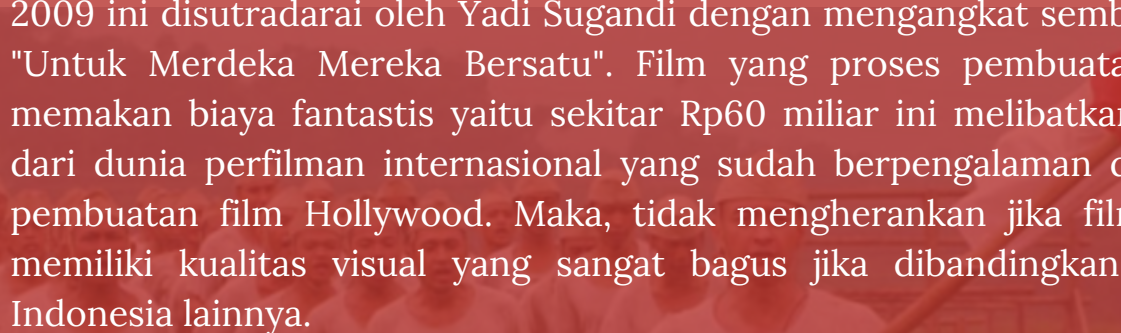
Pada tahun 2017 sendiri Dugin memberikan kritik kepada Presiden Rusia mengenai ketidakjelasan dirinya saat berbicara. Dugin mengutip “Saya pikir dia sendiri tidak mengerti apa yang dia katakan karena sekarang dia liberal kemudian sekarang konservatif; sekarang dia untuk kedaulatan, sekarang untuk globalisme, dan sekarang melawan globalisme.”

Pengaruh Dugin terhadap Kremlin tergolong sangat minim, bahkan jika kita pikir bahwa dalang terjadinya perang ini adalah ia sendiri sangat tidak masuk akal. Tentu saja Dugin mendukung terkait invasi terhadap Ukraina, tetapi untuk berpikiran bahwa dia menginspirasi Rusia untuk menginvasi Ukraina maupun bahwa hal tersebut merupakan keinginannya ialah sebuah kesalahan.






MERAH PUTIH, "UNTUK MERDEKA MEREKA BERSATU"



Film *Merah Putih* adalah film fiksi sejarah Indonesia yang merupakan bagian pertama dari Trilogi Merdeka. Film yang dirilis pada 13 Agustus 2009 ini disutradarai oleh Yadi Sugandi dengan mengangkat semboyan "Untuk Merdeka Mereka Bersatu". Film yang proses pembuatannya memakan biaya fantastis yaitu sekitar Rp60 miliar ini melibatkan kru dari dunia perfilman internasional yang sudah berpengalaman dalam pembuatan film Hollywood. Maka, tidak mengherankan jika film ini memiliki kualitas visual yang sangat bagus jika dibandingkan film Indonesia lainnya.



Film *Merah Putih* mengambil latar cerita pada masa Agresi Militer Belanda I pada tahun 1947 di Indonesia. Film ini menceritakan kisah persahabatan lima orang pejuang Indonesia yang mempunyai latar belakang yang berbeda, yaitu Amir yang diperankan oleh Lukman Sardi merupakan seorang guru yang beragama Islam, Marius yang diperankan oleh Darius Sinathrya merupakan seorang anak priyayi yang kaya raya, Suroño yang diperankan oleh Zumi Zola merupakan teman baik Marius, Thomas yang diperankan oleh Donny Alamsyah merupakan pemuda kristiani dari Sulawesi, dan seorang pemeluk agama Hindu dari Bali yang bernama Dayan diperankan oleh Teuku Rifnu Wikana.



Film ini mengisahkan calon tentara yang harus tinggal di dalam sebuah asrama. Setelah pendidikan di asrama tersebut selesai, mereka semua diizinkan untuk pulang menemui keluarga mereka. Namun, saat mereka sedang merayakan kelulusannya, tiba-tiba tentara Belanda menyerang mereka. Banyak korban berjatuh dalam peristiwa ini, salah satunya adalah Letnan Surono. Dalam serangan dadakan tersebut, di pihak tentara Indonesia hanya tersisa tiga orang perwira, yaitu Thomas, Dayan, dan Marius, serta satu orang Letnan yaitu Amir. Dengan sisa pasukan yang sangat sedikit tersebut rasanya sangat mustahil bagi untuk bisa mengalahkan pasukan Belanda yang berjumlah banyak. Akan tetapi, mereka tidak menyerah dan mengesampingkan segala perbedaan yang bisa memecah belah persatuan mereka untuk terus bertempur. Mereka pun menjadi musuh yang diperhitungkan dan terus diburu oleh tentara Belanda.

Pada suatu ketika pasukan Belanda menyerang sebuah desa yang didatangi keempat tentara Indonesia itu, mereka berempas selamat akan tetapi kondisi desa tersebut sungguh mengenaskan, banyak mayat yang bergelimpangan dan rumah penduduk hangus terbakar. Kemudian, mereka menyusun strategi untuk menjebak pasukan Belanda dengan bantuan beberapa penduduk sekitar yang masih selamat. Saat iring-iringan mobil dan truk yang membawa tentara Belanda akan melewati sebuah jembatan, pada saat yang bersamaan muncul beberapa penggembala yang membawa dombanya melewati jembatan tersebut, termasuk Thomas yang menyamar. Tanpa sepengetahuan pasukan Belanda, Thomas menyelipkan beberapa bom di belakang mobil tangki minyak milik tentara Belanda. Setelah itu, Thomas dan penggembala lainnya segera terjun ke sungai bersamaan dengan meledaknya tangki minyak milik tentara Belanda. Ledakan demi ledakan dari kendaraan milik pasukan Belanda terus terdengar, disaat bersamaan mereka juga harus menghadapi baku tembak dengan tentara pejuang Indonesia dan penduduk setempat. Dengan kondisi yang membuat mereka terjepit tersebut, akhirnya tentara Belanda pun menyerah di tangan pejuang Indonesia.



Di sinilah kisah tersebut berakhir. Pasukan Indonesia yang terkenal dengan kebhinekaannya tetap bersatu dan pantang menyerah untuk berjuang mengalahkan pasukan Belanda yang jumlahnya lebih banyak dan memiliki persenjataan yang lebih canggih. Sehingga, akhirnya mereka berhasil menaklukkan Belanda sekaligus dapat mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Dalam film ini, kita diperlihatkan beberapa nilai-nilai positif, seperti jiwa kepemimpinan, persatuan, cinta kepada keluarga dan tanah air, serta kemampuan mengambil keputusan dengan bijaksana. Hal ini terlihat pada adegan dimana saat pasukan Indonesia yang berada dalam keadaan terjepit mereka memutuskan untuk mundur demi menyusun rencana yang lebih matang dalam perang esok hari, "Kita mundur sekarang, kita mundur satu langkah, dan besok kita maju untuk bangsa".



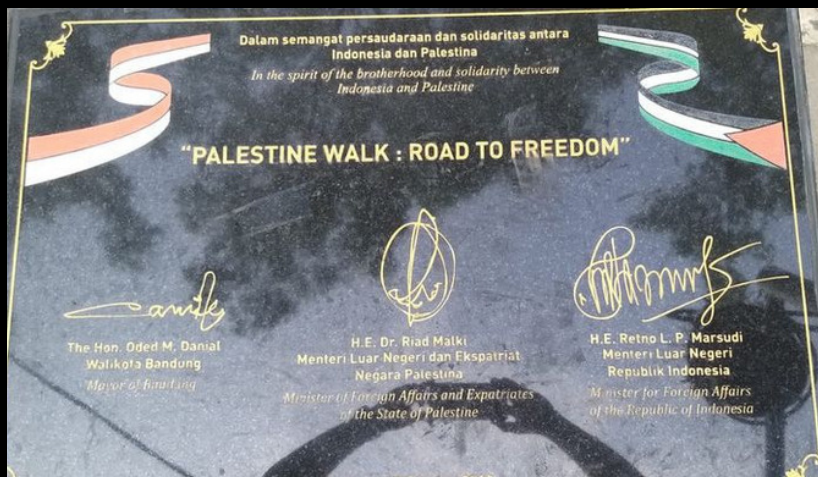
Dalam film ini ditampilkan juga nilai-nilai negatif yang diharapkan untuk dijadikan pelajaran oleh penonton agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Misalnya, watak penghianat yang dimiliki seorang lurah kampung yang berpihak kepada Belanda karena takut kehilangan kampungnya yang telah ia kuasai selama beberapa tahun. Pada akhirnya, dia justru dikhianati oleh tentara Belanda yang ia bela dengan dibunuh. Selain itu, juga diperlihatkan watak pengecut yang tercermin dari Marius. Sebagai tentara Marius justru memilih meninggalkan sahabatnya yang terluka karena takut mati.



Oleh sebab banyak pelajaran yang bisa diambil, film ini sangat cocok untuk dinikmati oleh generasi muda. Dengan menyaksikan film ini diharapkan penonton dapat menjaga kemerdekaan ini yang telah diperjuangkan dan dipertahankan oleh para pahlawan terdahulu dengan mempertaruhkan nyawa. Selain itu, generasi muda juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap kepemimpinan, persatuan, dan nasionalisme seperti yang diperlihatkan oleh tentara Indonesia di dalam film ini.



PERDAMAIAN



Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung perdamaian dunia dibuktikan melalui perannya dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Kini, saatnya Indonesia juga tampil sebagai juru damai penyelesaian konflik Rusia-Ukraina.

Foto: Naura Vidya

PEREKONOMIAN

- Group of Twenty (G20) merupakan forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Satu dari tiga topik utama yang akan diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia adalah Transformasi Ekonomi dan Digital.
- Tema besar penyelenggaraan G20 yang berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 adalah “Recover Together, Recover Stronger” yang dimaksudkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi Covid-19.
- Dalam kaitannya dengan transformasi digital, G20 diharapkan mampu memperkuat transformasi digital untuk mendorong sektor-sektor strategis seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami pemulihan pasca pandemi dengan beralih ke platform digital.



Foto: Rayhan Aliy & Faizal Rohman

KESEHATAN



Foto: Rayhan Aliy & Faizal Rohman



- Indonesia menginisiasi *digital innovation network* (inovasi sektor digital) guna membangun dan memfasilitasi kerja sama antara pemerintah dan pelaku inovasi swasta (*startup*, *venture capital*, serta korporasi) dalam skala global serta berbagi pengalaman dan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global di berbagai sektor.



- Berdasarkan *Digital Economy Working Group* (DEWG), jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64 juta dan telah berkontribusi setidaknya sekitar 60% PDB di Indonesia. Selama pandemi Covid-19, banyak UMKM yang mengalami keterpurukan, tetapi dengan cepat beralih dan menyesuaikan diri ke dunia digital.



KESEHATAN



- Salah satu topik utama yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia adalah Sistem Kesehatan Global. Ancaman Covid-19 dan potensi wabah lain di lintas negara adalah sesuatu yang harus dibicarakan, baik sekarang maupun hari-hari selanjutnya.
- Arsitektur Kesehatan Global menjadi Bahasan Pembuka dalam Pertemuan Sherpa Kedua Presidensi G20 Indonesia yang diadakan pada 12 Juli 2022.
- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan hal yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan di Indonesia saat memegang presidensi G20 di antaranya ialah *Financial Intermediary Fund* dan *Finance Health Platform* sebagai sarana pendanaan agenda kesehatan global pasca krisis pandemi.



- Dalam sesi Kedua KTT G20, Presiden Joko Widodo mendorong adanya kemitraan yang memberdayakan guna mengatasi kesenjangan kapasitas kesehatan negara berkembang terhadap negara maju.
- Pertemuan Menteri Kesehatan G20 Kedua merupakan pertemuan terakhir dari rangkaian Presidensi G20 Indonesia bidang kesehatan yang menargetkan kesepakatan aksi nyata. Salah satu bahasannya adalah harmonisasi protokol kesehatan global.



AKTIF, DINAMIS, KRITIS



Temukan Produk Cetak LPM Gema Keadilan lainnya!

MAJALAH



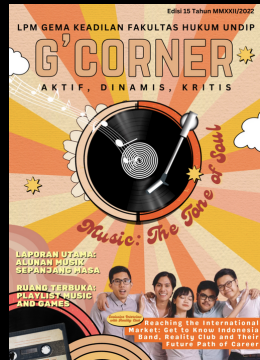
JURNAL



REPLIK



TABLOID



BUKU



Temukan LPM Gema Keadilan di :

INSTAGRAM

gemakeadilan

YOUTUBE

LPM Gema Keadilan

TWITTER

@gemakeadilan

WEBSITE

www.gemakeadilan.com

E-MAIL

redaksi.gk@gmail.com

LINE

@ixk8777d

Tata Letak Oleh *Carissa Maharani*

Ilustrasi Sampul Oleh *Muhammad Ridho & Rindu Pahlawati*



LPM GEMA KEADILAN

AKTIF, DINAMIS, KRITIS

Gedung Prof. Purwahid Patrik Fakultas Hukum Lt. 2
Jalan Prof Soedarto SH, Tembalang
Kota Semarang, Jawa Tengah
50275